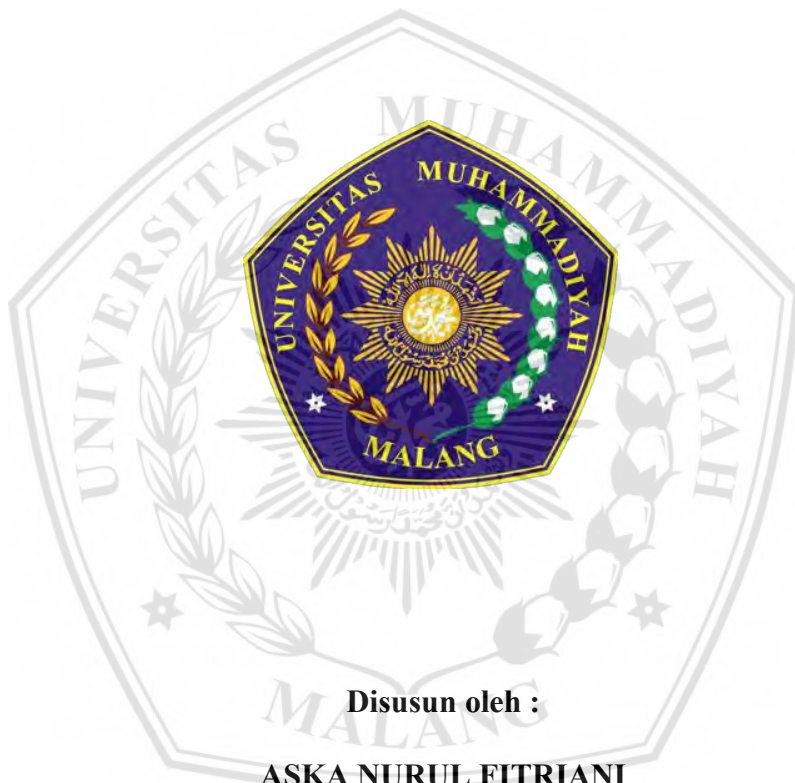


**MAKNA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA SURABAYA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun oleh :

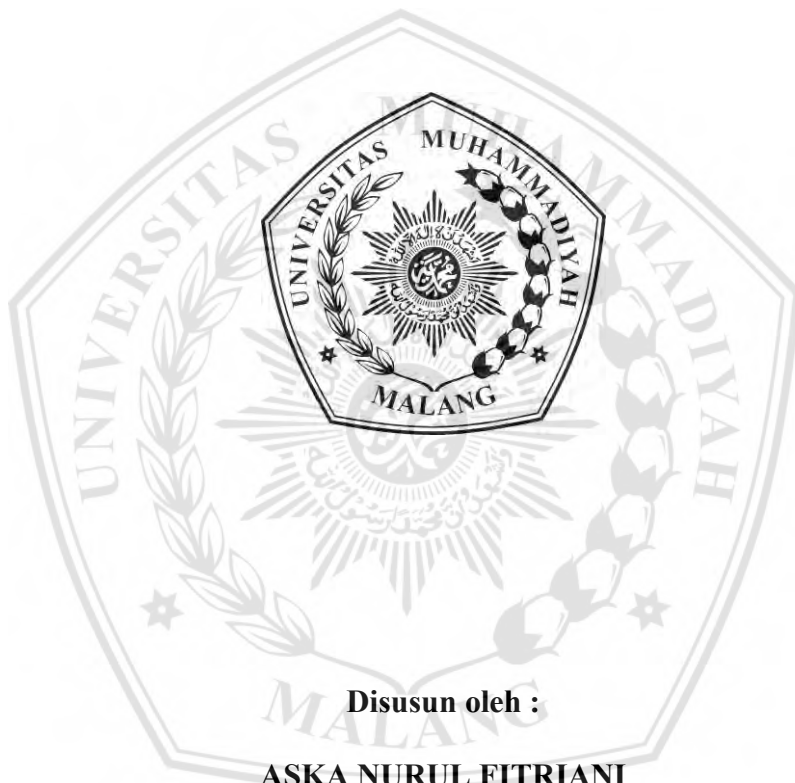
**ASKA NURUL FITRIANI
NIM : 201720270211016**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
November 2019**

**MAKNA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA SURABAYA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun oleh :

**ASKA NURUL FITRIANI
NIM : 201720270211016**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
November 2019**

MAKNA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA SURABAYA

ASKA NURUL FITRIANI
201720270211016

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Senin/ 28 Oktober 2019

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Direktur
Program Pascasarjana

Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Muslimin Machmud

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

TESIS

ASKA NURUL FITRIANI

201720270211016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Senin/ 28 Oktober 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Sekretaris / Penguji : Dr. Muslimin Machmud

Penguji : Dr. Wahyudi, M.Si

Penguji : Dr. Fauzik Lendriyono

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ASKA NURUL FITRIANI**

NIM : **201720270211016**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **MAKNA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SURABAYA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Oktober 2019


PETERAI
TEMPEL
RECEIPT F039400107
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ASKA NURUL FITRIANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penyusun panjatkan kepada Alloh SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, selanjutnya kepada Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan segala dukungan, sehingga penyusun bisa menyelesaikan Tesis dengan judul **“Makna Calon Legislatif Perempuan bagi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya”** penyusunan proposal ini diwujudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Pascasarjana Tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Malang pada Program Studi Magister Sosiologi.

Dalam penyusunan proposal ini, penyusun telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta dorongan baik berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Fauzan, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Akhsanul In'am, Ph.D, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si Ketua Program Studi Magister Sosiologi sekaligus Dosen Pembimbing Utama
4. Dr, Muslimin Machmud, Dosen Pembimbing Pendamping
5. Dra. Sumarlina, M.M., dan seluruh rekan kerja Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya
6. Teman-Teman Program Studi Sosiologi yang selalu mendukung terselesainya tesis ini.

Akhir kata, dalam penyusunan tesis ini disadari masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan senang hati untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 28 April 2019

Penyusun

ABSTRAK

ASKA NURUL FITRIANI : Makna Calon Legislatif Perempuan bagi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya. Prof Dr. Ishomuddin M.Si., Dr. Muslimin Machmud.

askanurul26@gmail.com

Interaksi simbolik dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa tumbuh beriringan mengingat posisi manusia yang hidup di antara objek-objek kehidupan yang perlu untuk dimaknai. Proses pemaknaan berjalan selama interaksi berlangsung dengan manusia lain dan lingkup sosial dimana ia tinggal dan berbagi pengalaman. Pemaknaan pada suatu hal baik dari segi pikiran, hingga tindakan merupakan hasil pengkonsepan diri atas apa yang telah dialami dan berjalan dalam kurun waktu cukup lama, dapat bersifat positif dan negatif apabila menimbulkan kesenjangan gender yang berujung pada labelisasi yang membagi peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berbeda, utamanya ketika perempuan terjun ke politik. Pencalonan legislatif perempuan untuk masuk dalam ranah politik dan diusung oleh partai politik pun menimbulkan pertanyaan, apakah parpol memang sadar betul keberadaan perempuan yang patut diposisikan dan disandingkan dalam tata birokrasi itu penting atau sekedar mengikuti aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam memenuhi kuota 30% perempuan dalam Pemilihan Legislatif sebagai salah satu syarat lolosnya partai politik melenggang sebagai Wakil Rakyat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya sebagai partai islam yang cukup lama terjun dalam pesta demokrasi memiliki pandangan tersendiri terhadap urgensi perempuan. PKS berdiri pada dua titik diametral yaitu memperjuangkan ideologi keislamannya namun juga berorientasi pada kemenangan di pemilu, hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan partai tentang keterbacaan perempuan di politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan calon legislatif perempuan bagi Partai keadilan Sejahtera Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial konstruktivisme. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles, Habermas, dan Saldana dengan uji kebasahan data triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian, dapat disimpulkan bahwa PKS masih setengah hati dalam memandang calon legislatif perempuan dari seluruh faktor yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. PKS sudah berupaya menjalankan GAD (Gender and Development) dalam kebijakan atau program kepartaian, meskipun belum optimal. PKS bukan seutuhnya partai kader, penjangkaran calon legislatif perempuan lebih banyak dari rekayasa sosial politik di eksternal partai. Sistem rekrutmen yang dijalankan juga tetap mengandalkan harga tawar bagi perempuan. Upaya pengenalan bagi calon legislatif kurang optimal dan berdampak bagi hasil pemilihan umum, dan ideologi PKS dalam memaknai perempuan mengacu pada islam fundamental dan kebutuhan politik praktis.

Kata Kunci : Gender, Perempuan, Politik

ABSTRACT

ASKA NURUL FITRIANI :Interpretation of Woman Legislative Candidate for Keadilan Sejahtera Party in Surabaya. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si., Dr. Muslimin Machmud.

askanurul26@gmail.com

Symbolic interaction in social life was always grown hand in hand, beared in mind the position of human who lived among the objects of life that needed to be interpreted. The process of interpretation ran during interaction with another human being and the social sphere in where they lived and shared experience. The interpretation on a matter both in terms of mind until the action was the result of self conception of what had been experienced and ran in a long period of time, could be positive and negative if it created a gender gap that tipped to labeling which divided the role and function of the woman and man with different proportion, especially when woman joined into politics. Woman's legislative candidacy to plunged in the political sphere and promoted by political party also raised the question, whether political party was really awared of the existance of woman that should be positioned and juxtaposed in the bureaucratic system was important or just followed the rule of KPU (General Election Commission) in filled the 30% quota of woman in the legislative election as one of the requirements for the escape of a political party as a public representative. Keadilan Sejahtera Party (PKS) in Surabaya as islamic party that had long been involved in a democratic party, had its own view of the urgency of woman. PKS was stand at two diametric points that fought for their islamic ideology but also oriented to get the win in the election, that was certainly affected of the party's policy on woman readalibity in politics. The purpose of this research was to know the form of the interpretation of woman legislative candidat for Keadilan Sejahtera Party in Surabaya. This research used constructivism social definition paradigm. Approximation method with qualitative and descriptive type. Data collection taken by interview, observation, and documentation. Data analysis used Miles, Habermas, and Saldana Theory with Trianggulation data source as validity test.

Based on the result and analysis data, Keadilan Sejahtera Party (PKS) was "Unpassionately Support" to interprate of woman legislative candidate in all factors that were access, partisipation, control, and benefit. PKS had tried to implementation of GAD (Gender and Development) for their policy or party programs, although was not fully optimal yet. PKS was not cadre party, they were almost picked up all of the woman legislative candidate from socio-political engineering in external party. The recruitment system in this party settled used on bargaining position of woman. The effort to introduce the woman legislative candidate was not full support and that was impact for the result of the election, also PKS ideology to interprate of woman was refer to islamic fundamental and practical political need.

Keywords : Gender, Woman, Politics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
Penelitian Terdahulu	3
Gender, perempuan, dan Politik	6
Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blummer	8
Kerangka Pemikiran.....	9
METODE PENELITIAN	9
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	10
Makna Calon Legislatif Perempuan bagi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya	10
PENUTUP	32
Simpulan	32
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
LAMPIRAN PENELITIAN.....	ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	3
Gambar 1.2 Alur Kerangka Pemikiran	9



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pencalonan legislatif perempuan untuk masuk dalam ranah politik dan diusung oleh partai politik menimbulkan pertanyaan yang selalu disuguhkan dalam setiap kontestasi, apakah parpol memang sadar betul keberadaan perempuan yang patut diposisikan dan disandingkan dalam tata birokrasi itu penting atau sekedar mengikuti aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam memenuhi kuota 30% perempuan dalam Pemilihan Legislatif sebagai salah satu syarat lolosnya partai politik melenggang sebagai Wakil Rakyat. Posisi perempuan dalam pandangan partai politik berbeda-beda, sehingga implementasi sistem rekrutmen dan kerjanya juga dipastikan berbeda. Sejauh ini memang keterbacaan perempuan yang ingin bersaing di politik tidak begitu diunggulkan, sehingga keterbacaan publik pun juga rendah yang menyebabkan terpilihnya perempuan di parlemen juga kecil, khususnya bagi partai berlabel islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan data KPU Kota Surabaya, Partai Keadilan Sejahtera dalam lingkup DPRD Kota, menempatkan calon legislatif perempuan untuk periode tiga kali pemilihan legislatif, rinciannya periode 2004-2009 sebanyak 14 caleg perempuan dan 33 caleg laki-laki, 2009-2014 17 caleg perempuan dan 33 caleg laki-laki, dan 2014-2019 18 caleg perempuan dan 37 caleg laki-laki. Namun, komposisi legislatif perempuan di DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS berdasarkan pemilihan umum 2009-2014 dan 2014-2019 adalah laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang. Sementara itu untuk partai besar lainnya seperti PDIP periode 2009-2014 adalah laki-laki 6 orang dan perempuan 2 orang, periode 2014-2019 laki-laki 10 orang dan perempuan 5 orang, Golkar periode 2009-2014 laki-laki 5 orang dan perempuan 0, periode 2014-2019 laki-laki 1 orang dan perempuan 3 orang, dan Demokrat periode 2009-2014 laki-laki 9 orang dan perempuan 7 orang, periode 2014-2019 laki-laki 2 orang dan perempuan 4 orang. Mengacu pada data ini, jumlah keterwakilan dari fraksi PKS dianggap sangat kecil. Jumlah keterwakilan perempuan ini dianggap jauh dari kebutuhan politik untuk meningkatkan kualitas perempuan di bidang politik.

Pandangan atas keberadaan caleg perempuan dalam konstruksi sosial yang telah dibentuk adalah perempuan caleg rata-rata tidak memiliki basis sosial tinggi yang disebabkan kurangnya kesempatan mereka berada di ruang-ruang publik, membagi waktu dengan bekerja dan mengurus urusan domestik rumah tangga, sementara metode suara terbanyak mensyaratkan interaksi dengan pemilih yang cukup intensif. Problem lain adalah kuota tanpa kader, artinya banyak partai yang mampu mengisi kuota perempuan,

tetapi parpol berupaya mengisinya secara instan dengan calon-calon yang populer, yang sudah punya nama dan pengikut banyak, terkadang juga secara instan dari mereka yang bahkan tidak punya dasar politik, karena keterbatasan kemampuan partai dalam merekrut perempuan-perempuan untuk bergabung, justru ini suatu tindakan pragmatis yang mengabaikan keseriusan proses politik. Karena sejatinya untuk bisa menciptakan sistem politik yang berkualitas juga harus melalui sistem rekrutmen yang berkualitas, sekalipun publik atau penyelenggara pemilu tidak menafikkan dinasti politik yang masih berlangsung dari sekedar punya kenalan hingga kepentingan golongan. Dalam *open list system*, partai politik juga cenderung lepas tangan terhadap caleg-caleg perempuan untuk berkompetisi dan berebut suara dengan caleg laki-laki (Hendrarti, 2017:84). Bagi mereka yang masih berpandangan pada perempuan adalah subordinat laki-laki, golongan ini mendasarkan pendapatnya pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*” Ayat surat tersebut diperkuat dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi “*Bagi para wanita, mereka punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang benar. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.*” Ayat-ayat tersebut sering dikaitkan dalam konteks rumah tangga saja, akan tetapi banyak pula golongan yang memakai dengan logika apabila seorang kepala rumah tangga saja haruslah laki-laki, maka seorang kepala negara juga harus laki-laki (Haryati, 2017:7).

Selain ayat, ada juga hadits Rasulullah SAW terkait dengan posisi perempuan, yang beliau bersabda: *Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.*” (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i). Dari hadits ini ulama banyak berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperkenankan menduduki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita juga masih menjadi perdebatan para ulama. Ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i bahkan dengan jelas berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadipemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas (Haryati, 2017:7).

Tetapi, kondisi ini menimbulkan beragam pandangan, bahwa Ideologi Islam yang menjadi identitas yang diperjuangkan PKS Kota Surabaya berhadapan secara diametral dengan politik praktis. Sebuah partai politik hampir pasti mengusung politik praktis meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Sebuah partai politik didirikan untuk

memenangkan kontestasi yang dicapai dengan diraihnya dukungan terbanyak dari pemilih. PKS Kota Surabaya berdiri pada dua titik diametral ini. Ia memperjuangkan sebuah ideologi, sebuah identitas. Namun juga ia adalah kelompok politik yang menargetkan kemenangan dalam setiap kontestasi politik (Sugiarto, 2018). Tidak mudah memang, akan tetapi ketika pondasi islam dicampur dengan politik praktis yang memang dikenal “kotor” ini bisa memicu konflik internal dan eksternal bagi tubuh kepartaian, apakah mereka bisa menjalankan fungsinya selaras dengan paradigma islam diiringi juga dengan paradigma politik praktis yang sudah mendarahdaging di seluruh partai politik.

Penerapan politik identitas dan eksklusif membuat partai ini memiliki kolam suara yang sempit. Sehingga, aksesibilitas perempuan untuk bisa diwadahi PKS juga kecil. Berangkat dari anggapan bahwa islam adalah agama bernuansa maskulin, di mana posisi tawar laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, dan hak istimewa menjadi pemimpin juga masih didominasi kaum adam, sementara di sisi lain suara keterwakilan perempuan dari PKS Kota Surabaya tidak cukup banyak, sehingga kembali pada regulasi atau kebijakan pimpinan partai atas sistem yang selama ini dibangun agar asas keadilan dan kesetaraan gender tetap ditegakkan dalam segala kegiatan politik, maka perlu untuk dikaji mendalam tentang model atau bentuk pemaknaan perempuan sebagai calon legislatif di mata partai yang memiliki identitas islam kuat namun juga berjalan diatas ideologi politik praktis. Penelitian ini akan mendeskripsikan pemaknaan calon legislatif perempuan bagi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya, apakah partai mengacu pada ideologi islam kuat atau pada paradigma politik praktis, atau keduanya. Dikaji melalui 4 faktor yaitu faktor akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh bagi calon legislatif perempuan. Penelitian ini juga berkorelasi langsung pada sistem rekrutmen dan pertimbangan-pertimbangan PKS dalam menjalankan kebijakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wahid (2013) “Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilu Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012”, Supadiyanto (2015) “Representasi Wanita dalam Politik di Indonesia : Pendekatan Konstruksionisme Kritis”, Hendarti (2017) “Perempuan dalam Kontestasi Politik : Reperesentasi Deskriptif Perempuan Pada Pileg 2014 dan Pilkada 2015”, Musdawati (2018) “Kekerasan Simbolik dan Pengalaman Perempuan Berpolitik di Aceh”. Berikut penjabarannya :

Gambar 1.1 Mapping Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEORI PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	UMAIMAH WAHID (2013) MALAYSIAN JOURNAL COMMUNICATION VOL. 29 NO.1 ISSN 0128-1496	PEREMPUAN DAN KEKUASAAN POLITIK DALAM PEMILUKADA DKI JAKARTA TAHUN 2012	Teori Kekuasaan Politik dan Subjektivitas Perempuan dalam Gerakan <i>Counter Hegemony</i>	1. Kualitatif 2. Studi kasus 3. <i>Feminsit research</i> 4. Paradigma kritis 5. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam.	1. Marginalisasi perempuan di politik ada 2. Keberadaan perempuan dianggap mengganggu status quo laki-laki 3. Partai politik belum percaya atas kemampuan perempuan 4. Politik bias gender, merujuk pada maskulinitas politik
2	SUPADIYANTO (2015) JURNAL KOMUNIKASI ISLAM VOL.7 NO.1 ISSN 2085-3521	REPRESENTASI WANITA DALAM POLITIK DI INDOENSIA : PENDEKATAN KONSTRUKSIONISME KRITIS	Teori konstruksionisme kombinasi teori konflik dan interaksionisme simbolik	1. Kualitatif 2. Deskriptif 3. Paradigma kritis 4. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.	1. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kaum wanita 2. Mahalnya ongkos politik menjadi penghambat terjun ke politik 3. Dominasi politik dinasti/keturunan keluarga masih mendominasi 4. Dunia politik praktis distigmatisasikan identik dengan cara-cara yang kotor, kejahatan, konspirasi dan skandal dan itu hanya cocok bagi laki-laki
3	DWI W.B. HENDRARTI (2017) JURNAL ILMU POLITIK VOL.22 NO.1 ISSN 0854-6029	PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK : REPRESENTASI DESKRIPSTIF PEREMPAUN PADA PILEG 2014 DAN PILKADA 2015	Teori representasi politik.	1. Kualitatif 2. Deskriptif 3. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi	1. Arena kontestasi terbatas, peluang perempuan lolos kecil 2. Sekalipun jika representasi perempuan meningkat, artikulasi kepentingan dan kedudukan

					<p>perempuan tidak nampak jelas</p> <ol style="list-style-type: none"> Model peran perempuan di politik terbatas, sehingga memilih kurang menyadari pentingnya peran perempuan di politik Perempuan tidak punya elektabilitas yang mampu mendongkrak prai politik Perempuan memiliki pengalaman politik yang rendah Partai politik menjadikan perempuan sebatas pemanis/pemenuhan syarat administrasi/regulasi pemilu
4	MUSDAWATI (2018) JURNLA ILMU HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, DAN PRANATA SOSIAL VOL2 NO.2 ISSN 2541-4682	KEKERASAN SIMBOLIK DAN PENGALAMAN PEREMPUAN BERPOLITIK DI ACEH	Teori kekerasan simbolik	<ol style="list-style-type: none"> Kualitatif Deskripti. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Maskulinitas politik masih ada Partai politik menjadikan perempuan sebatas pelengkap Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan oleh kuatnya budayapatriarki dimana laki-laki masih ditempatkan pada posisi superior, rendahnya kapasitas perempuan dalam berpolitik, keterbatasan sumber finansial, dan pandangan agama bahwa perempuan cukup jadi makmum. Parktek kekuasaan secara halus menjadikan perempuan tanpa sadar menjadi korban politik

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019

Gender, Perempuan, dan Politik

Gender, perempuan dan politik menjadi bagian tak terpisahkan ketika berbicara tentang urgensi bagi kaum perempuan menduduki kursi pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan problematika kompleks yang mewarnai pertarungan posisi perempuan di parlemen. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Keberadaannya sangat tergantung pada konstruksi sosial dari masyarakat yang tersebut. Down to Earth Indonesia (www.downtoearth-Indonesia.org diakses 8 Oktober 2018) mengartikan gender sebagai variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan.

Issue gender sesungguhnya juga menjadi pendekatan tersendiri yang dipengaruhi teori kritis feminis. Rasyidin dan Aruni (2016:27-28) menjelaskan bahwa kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, *Charles Fourier* pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi *John Stuart Mill*, "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun 1869. Perjuangan mereka menandai kelahiran paham feminisme Gelombang Pertama, di mana momentum awal gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan hak-hak perempuan dan kebebasan menyeimbangkan peran.

Secara umum jika digambarkan, kaum perempuan selalu merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) seperti bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya terutama dalam masyarakat yang masih berpatokan pada budaya patriarki. Sementara juga perlu dipahami bahwa dalam masyarakat tradisional yang kebanyakan di antara mereka berorientasi pada pekerjaan di area pertanian atau berkebun yang masuk dalam lingkup agraria, kaum laki-laki kebanyakan cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah (publik), sementara kaum perempuan di dalam rumah (domestik/rumahtangga). Pembagian peran ini yang secara tidak langsung telah melabelisasikan posisi perempuan sebagai kaum yang "manut" dan cukup bertugas jadi pelengkap laki-laki.

Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat sendiri. Sehingga gender penting dipahami dan di analisa untuk melihat apakah perbedaan tersebut menimbulkan diskriminasi dalam arti membawa dampak negatif atau kerugian utamanya bagi kaum perempuan yang selama ini masih dianggap

tidak setara dengan laki-laki. Poin penting yang juga perlu menjadi bagian dasar pemikiran semua orang bahwa gender tidak sebatas pada penyetaraan tetapi lebih luas lagi yaitu kepada kesetaraan kemanusiaan, menyejajarkan suara perempuan dengan suara laki-laki. Jika difokuskan pada aspek politik dan birokrasi, bagaimana peran perempuan mampu mengubah pandangan dunia bahwa keadilan politik dan tingkat kualitas hidup perempuan di suatu negara bisa membawa dampak signifikan pada berkembangnya perspektif politik yang adil bagi setiap golongan dan gender untuk kemajuan suatu bangsa, tentu tidak perlu heran, karena cara pandang dan kemampuan yang dimiliki perempuan relitasnya mampu mengubah dunia. Mengubah anggapan yang selama ini disematkan pada laki-laki yang memiliki andil lebih besar pada kemajuan perpolitikan suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan data Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM (2007), kewajiban negara yang terkait dengan hak politik perempuan juga terdapat dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 (Sidang ke-16 Tahun 1997) tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik. Komite ini memberikan rekomendasi bahwa negara peserta wajib : 1. menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya, 2. menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, 3. melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, 4. adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (*public elected positions*). Upaya ini kemudian jika dikaji lebih jauh masih banyak fakta di lapangan yang menemukan kesenjangan gender atau bias gender dialami kaum perempuan.

Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari posisi tawar perempuan yang lemah dalam proporsi pembuatan kebijakan dan sensitivitas yang belum bergeliat pada birokrasi publik umumnya (Suryadi, 2015:3). Skeptisme terhadap kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk turut mengambil posisi dalam bidang-bidang yang strategis. Bahkan terdapat kecenderungan, partai politik menempatkan perempuan dalam calon legislatif hanya sekedar memenuhi kewajiban regulasi. Partai tidak serius memberikan peluang dan dorongan bagi partisipasi perempuan dalam bidang politik. Peran politik perempuan dalam arena politik nampaknya juga masih sebatas diskursus. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan kecil yaitu masih sebatas wacana dalam berbagai ajang diskusi ataupun kegiatan pelatihan. Jika mengacu pada kondisi ini, sebenarnya perempuan bisa melakukan apa saja dengan kualitas dan potensi yang dimiliki. Perempuan mampu menjadi pemimpin dari tingkat atas

hingga bawah. Namun harapan itu justru masih berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, perempuan banyak yang ditolak dan diabaikan oleh komunitasnya sendiri ketika ingin bersuara dan mengambil peran lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketidadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma di masyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut lagi-lagi dimainkan oleh kaum laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang tidak bisa terlepas dari pro dan kontra, penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa, antara yang berkuasa dengan yang tidak. Persoalan pengaruh inilah yang harusnya digerakkan dari sesama kaum perempuan untuk memberi kepercayaan dan ruang yang sedikit lebar kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya.

Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin menabrak budaya yang terlanjur mendominasi (www.pelita.or.id dalam Suryadi, 2015:3-4). Guna mewujudkan kesetaraan atau keadilan gender dengan upaya *affirmative action*, Bappenas (2001:9) juga bekerjasama dengan CIDA melalui *Women's Support Project Phase II* mengembangkan alur kerja analisis gender yang dikenal dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan oleh (terutama) para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, objek dan atau kegiatan pembangunan.

Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blummer

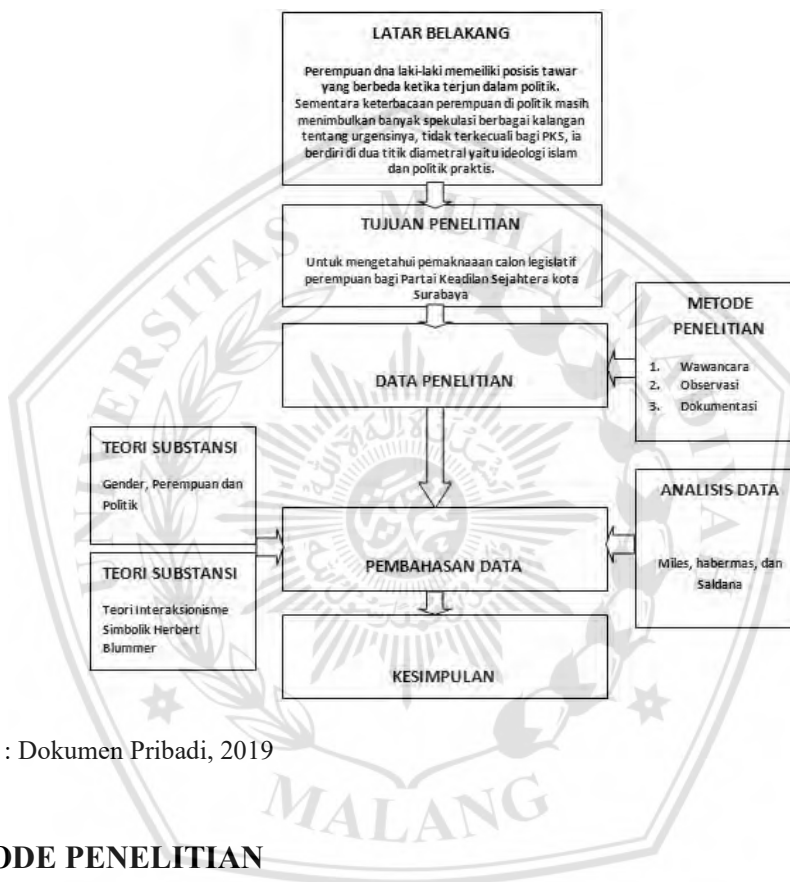
Interaksionisme simbolik identik dengan istilah simbol. Simbol diartikan sebagai objek sosial dalam interaksi yang digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Orang-orang tersebut akan memberikan arti. Mereka mengubah dan menciptakan makna itu ke dalam bentuk interaksi sosial. Simbol-simbol yang terbentuk itu bisa berbentuk objek fisik (benda kasat mata), kata-kata (untuk mewakili objek fisik, perasaan, ide, dan nilai), serta tindakan (yang dilakukan orang untuk memberi arti dalam berkomunikasi dengan orang lain) (Charron, 1979). Untuk memahami fenomena simbolisasi atau labelisasi di masyarakat, Veeger (1993:224-227) mengatakan bahwa Herbert Blummer menjabarkan lima konsep dasar dalam interaksionisme simbolik yaitu konsep diri, yaitu manusia sadar akan keberadaannya, kedua konsep perbuatan, manusia merancang sendiri perbuatan/tindakannya, ketiga konsep objek, manusia dikelilingi objek yang perlu dimaknai, keempat konsep interaksi sosial, individu berinteraksi dengan individu lain dan mencoba memaknai maksud orang lain atas pemaknaan objek, dan terakhir konsep

tindakan bersama, yaitu kesepakatan kolektif atas makna suatu objek tertentu yang telah berjalan cukup lama. Di mana makna itu disempurnakan pada proses interaksi yang telah intens.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan seperti berikut :

Gambar 1.2 Alur Kerangka Pemikiran



Sumber : Dokumen Pribadi, 2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial konstruktivisme. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles, Habermas, dan Saldana dengan uji kebasahan data triangulasi sumber data.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Makna Calon Legislatif Perempuan Bagi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya

Perempuan adalah sosok yang bisa menopang pembangunan. Keterisian perempuan dalam pembangunan mampu memberikan rasa percaya diri bagi perempuan untuk mengembangkan perannya di ranah publik dan memberikan dorongan pemberdayaan masyarakat yang lebih massif apabila mendapatkan dukungan penuh. Namun di sisi lain, masyarakat masih belum dapat mempercayai kemampuan perempuan seutuhnya, pemahaman agama yang memandang bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau sudah selayaknya sebagai makmumnya laki-laki, sehingga dominasi ruang-ruang publik lebih banyak diwakili laki-laki, juga di ranah politik yang berkaitan dengan komitmen partai untuk meningkatkan kualitas kader partai perempuan yang rendah. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi penghambat masuknya perempuan dalam arena politik, di samping harus menghadapi berbagai persoalan, diskriminasi, marginalisasi bahkan stereotype bahwa politik bukanlah wilayah garapan perempuan dan posisi perempuan sebagai objek dan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% demi syarat lolosnya verifikasi partai menjelang pemilu. Meskipun di awal diyakini bahwa tindakan mendorong perempuan untuk berpartisipasi lebih dalam politik merupakan sesuatu yang akan mendorong terhadap upaya-upaya pemberdayaan perempuan itu sendiri, namun tanpa disadari bahwa perempuan justru masih ada yang menjadi korban dari sistem atau pun regulasi yang diterapkan.

Mengacu pada kondisi di mana ruang gerak perempuan yang masih sempit, ketidakpercayaan bagi perempuan bergabung dalam politik belum sepenuhnya dipahami. Pola interaksi yang menampilkan perempuan sebagai individu nomor dua, telah menciptakan konstruksi sosial tentang peran dan tugas perempuan menjadi tidak fleksibel. Kesempatan perempuan untuk masuk dalam politik sebenarnya ada dan memungkinkan. Tergantung bagaimana upaya partai sebagai pengukuh calon bisa membangun sinergi yang baik dalam memandang pentingnya perempuan sebagai bagian dari mesin partai.

PKS sebagai partai yang telah lama berkecimpung dalam pesta demokrasi, yang membawa dasar islam dalam perjalanan politiknya tentu akan memiliki persepsi tersendiri tentang makna perempuan, begitu juga bagi kalangan pengamat, peneliti ataupun penyelenggara pemilu dalam memandang keterwakilan perempuan dalam bursa pencalonan di PKS. Maka dari itu untuk melihat seberapa jauh urgensi atau pemaknaan calon legislatif perempuan, berikut pemaparannya yang dikaji dalam empat faktor yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat :

1. Faktor Akses

Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan sistem penyeleksian calon anggota legislatif memiliki skema atau alur tersendiri. Ada yang menggunakan *open recruitment* yang juga diimbangi *close recruitment*. Rekrutmen terbuka digunakan untuk masyarakat umum, sementara rekrutmen tertutup untuk internal partai yang memanfaatkan jaringan keluarga, perkenalan pertemanan atau kader.

Sistem rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik yang dijalankan. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses yang dilakukan tim seleksi partai dalam menentukan calon-calonnya dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan yang sesuai atau tidak, sehingga tata pemerintahan yang dicita-citakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Pada tubuh partai PKS terdapat tim khusus yang menyeleksi calon anggota partai salah satunya untuk dicalonkan dalam pemilihan legislatif. Tim seleksi memiliki tugas dan peranannya untuk menentukan seberapa layak caleg perempuan tersebut. Tim seleksi ini dapat disebut sebagai *gatekeeper* yang nantinya bertugas menyaring siapa saja yang bisa lolos dan memenuhi kriteria sebagai caleg yang diusung partai. Faktor yang menjadi poin tinggi dalam penyeleksian kandidat melalui partai adalah :

- 1) Seberapa besar modal sosial yang dimiliki caleg perempuan untuk bisa terjun di politik, karena tidak cukup hanya modal ekonomi saja. Harga tawar menjadi pertimbangan untuk meloloskan caleg.
- 2) Untuk kader, sejauh mana pengabdian perempuan caleg yang diberikan kepada partai. Pengabdian dapat dilihat dari lama tidaknya perempuan caleg bergabung dalam partai, keaktifan dalam kegiatan partai, dan prestasi apa yang telah di teorehkan kepada partai begitu juga berdampak bagi masyarakat.
- 3) Tingkat pendidikan dari calon legislatif perempuan. Semakin tinggi pendidikan caleg maka semakin memperbesar kesempatan atau peluang untuk mendapat simpati dari partai.

Faktor-faktor tersebut menjadi penguat dicalonkannya perempuan dalam pencalonan legislatif partai politik. Apabila ada kandidat yang berlatar belakangkeluarganya adalah dari keluarga politik, hal tersebut bukan menjadi faktor utama partai untuk meloloskan

kandidat, karena bagi PKS pun kualitas menjadi prioritas partai dalam menyeleksi. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa jika memiliki *background* keluarga yang juga merupakan politisi punya pengaruh dalam hasil seleksi *gatekeeper*, tetapi pengaruh tersebut hanya sebatas omongan atau *lobby-lobby* politik secara intens. Ada faktor informal juga yang ikut andil dan pasti ada, dalam mempengaruhi tawaran dari para calon-calon legislatif perempuan kepada tim seleksi atau yang menentukan kandidasi, akan terjadi antara penawaran dan tuntutan saling berinteraksi yang kemudian menghasilkan *output* berupa politisi yang direkrut untuk menduduki posisi/kursi-kursi jabatan di pemerintahan.

Sistem rekrutmen yang ditetapkan oleh PKS, Sekjen PKS menyebutkan ada tiga syarat utama yang harus diperhatikan ketika seseorang perempuan ingin mencalonkan diri yaitu tidak punya catatan hukum, tidak punya catatan amoralitas, dan memiliki keluarga yang stabil, baik dari segi keharmonisan hingga pendidikan atau ekonominya (www.detik.news diakses 20 desember 2018). Sementara perempuan yang telah berkontribusi dalam PKS dan telah diberdayakan kemudian bisa menjadi kader PKS, setidaknya memiliki 5 ciri yaitu sederhana, Ash-Shalah (menjaga sholat), At-Tilawah (menjaga tilawah), Al-Jundiyah (mensegerakan perintah dari pemimpin yang baik) serta Al-Akhlaq (memiliki akhlaq yang baik). Ketika perempuan telah diberdayakan dan menjadi kader aktif, maka tahap selanjutnya kader-kader ini akan memasuki fase pengorganisasian secara berkelanjutan, fase ini menempatkan perempuan agar siap bersaing dengan kader laki-laki guna menduduki jabatan pemerintah. Yang dipertimbangkan dalam posisi ini sesungguhnya adalah pada pengalaman dan kemampuan bukan perspektif jenis kelamin. Sehingga tidak ada batasan bagi perempuan atau laki-laki yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif namun tetap sesuai aturan yang berlaku di tubuh kepartaian.

Achmad Suyanto Ketua Umum Fraksi PKS Kota Surabaya mengatakan :

“Ya..kita kasih akses yang sama lah sama semua orang baik itu perempuan atau laki-laki. PKS identiknya sebagai partai kader tapi faktanya gak juga, hitunganya kader itu adalah setiap orang yang sudah pegang KTA PKS kan sudah kader. Yaa..artinya setelah dia menerima sekian banyak fatur politik, sopan santun politik di PKS itu dan sekian banyak pola pendekatan yang dilakukan PKS dia terima ya oke. Tapi tentu basis sosial dilihat. Publik juga akan melihat *white ring*, rentang panjang dari keterkenalan perempuan di publik. Bukan pertimbangan utama, karena PKS kan terbiasa bukan figur. Kita bisa mengendorse orang dengan rekayasa sosial politik. Kita juga ada pertimbangan-pertimbangan, jam terbang itu bagi mereka yang mau mencalonkan ada nilainya, basis sosial harus tinggi. Dilihat rekam jejaknya, berdasar itu kita lakukan *scoring* berapa nilainya, kita tentukan terkait siapa dia. Lanjut ke penentuan nomor itu juga dari rangking uji kompetensi PKS, yang bersangkutan *well known* atau tidak. Jadi penomoran itu berdasarkan *track recordnya*, penomoran j... kita sesuaikan dengan hasil nilai kriteria-kriteri itu, kalau rekam jejaknya gak bagus 12 x mungkin dapat nomor atas, tapi banyak

kok dari PKS kita yang dapat nomor atas untuk perempuan-perempuan caleg. Tapi, tahun ini juga ada beberapa artis yang ikut nyaleg lewat PKS, ya kita tetap *check* rekam jejaknya.”

Reny Astuti, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Kota Surabaya selama 2 kali periode, sekaligus Pengurus Partai, juga mengatakan :

“Di PKS itu rekrutmennya ada pemilihan internal juga, kader menyampaikan usulan nama-nama. Dari nama-nama yang muncul itu digodok di struktur, selanjutnya struktur memilih di antara mereka mana yang berpotensi dan mana yang tidak, untuk proses pencalegan. Nah jika secara angka kuantitas perempuan mungkin kita melihat masih sebagai pendukung kalau dilihat dari jumlah ya. Secara umum masih didominasi laki-laki, tapi sekarang penomoran dari PKS juga sudah sesuai, banyak nomor 1 diisi caleg perempuan. Yang perlu dipahami publik juga pendaftaran di kita itu nol, foto saja kita fotokan biar kelihatan bagus. Proses pencalegan di PKS kita lihat dari 2 hal, modal sosial dan uang. Sekarang tanpa uang juga tidak bisa, tergantung bagaimana perempuan bisa efektif dan efisien mengelola itu. Tanpa Modal sosial, butuh modal dana yg besar, tapi kalau modal sosialnya sudah kuat, itu bisa terbantu. Kinerja dewan itu membentuk modal sosial, itulah kenapa incumbent banyak yg jadi lagi. Karena dari segi modal dananya juga lebih siap. Untuk rekrutmen kita juga tetap mengacu pada *fatsun-fatsun* PKS karena kita dasarnya sudah menjadi partai islam.”

Berdasarkan penjabaran Ahmad Suyanto dan Reny Astuti, PKS telah memberikan akses sama bagi calon legislatif perempuan ataupun laki-laki. Sistem rekrutmen yang dijalankan sudah dianggap mewadahi aspirasi perempuan untuk bergabung dalam politik dan besanding dengan laki-laki. Dalam tahap di mana perempuan dapat direkrut oleh PKS juga sangat bergantung pada modal politik yang dimiliki, selain basis masa juga dari segi modal yang cukup. PKS memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan hak politiknya meskipun ada kriteria-kriteria khusus yang dimiliki *gatekeeper* selaku menyeleksi dalam meloloskan perempuan bergabung di partainya. Sementara itu, PKS juga terbiasa dengan sistem *rekayasa* politik untuk mendapatkan lebih banyak nilai tambah bagi calon yang diusung dengan mengandalkan orang dari eksternal partai ataupun tokoh publik, yang terkenal memiliki dukungan massa lebih banyak. Hal ini dapat dimaknai bahwa PKS belum percaya sepenuhnya pada kader-kader militan yang telah dibentuk dalam tubuh kepartaian, alhasil mengandalkan *eks* dari PKS adalah jalan keluar agar PKS dapat mengisi jatah kursi dewan. Selain itu, sistem yang diterapkan PKS ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk memarginalkan kalangan perempuan yang ingin bergabung namun tidak memiliki modal sosial dan politik yang bagus, sehingga secara langsung akan tidak masuk ke bursa pencalegan. Sementara itu, PKS dengan *fatsun-fatsun* politik yang diusung, tetap dijadikan pedoman bagi PKS menjalankan visi misinya di politik dengan tetap berpegang pada keislamannya dan politik praktis yang dijalankan bersamaan, meskipun akan berpengaruh pada setiap

pengambilan keputusan. PKS tidak menjadikan dalil dalam al-hadist ataupun al-qur'an sebagai penghambat perempuan bergabung dengan politik.

Sementara itu, Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender Universitas Airlangga Surabaya menuturkan :

“Sistem rekrutemen partai punya pengaruh besar. Rekrutmen dari proses nominasi, tahapan internal partai, pendaftaran ini saya memperhatikan betul, misalnya bulan Agustus saya mencoba melihat di bulan Maret, April, parahnya mereka belum apa-apa, belum tau siapa yang mau diusung, perempuan mana, belum ada. Baru sebulan dua bulan mereka asal-asalan memasukkan, alhasil partai tanpa kader, ia minim kader terutama perempuan. Maka jangan heran kalau yang tidak punya *basic* politik tapi punya basis sosial tinggi bisa lolos seleksi partai, karena memang tidak banyak upaya optimal untuk membangun calon legislatif dari kader-kader yang berkualitas dan siap pakai. Perempuan secara aktual harus mampu mengekspresikan keinginan, dorongan dan kontemplasinya untuk running dalam pemilu. Oleh sebab itu ambisi dan modal yang dimiliki perempuan caleg sedemikian mungkin dimanfaatkan sebagai peluang untuk meyakinkan tim *gatekeepers* yang mayoritas adalah laki-laki. Partai sekarang itu juga berhitung, ketika data survey menunjukkan 51% pemilih adalah perempuan dan itulah yg jadi sasaran tembak, kalau dia tidak menempatkan perempuan di nomor-nomor yang tidak cantik, dia akan kalah. Saya mencoba memetakan bahwa hasil *research* saya juga menunjukkan nomor 1-3 sudah mulai menempatkan perempuan, karena secara real memang kursi partai biasanya hanya ada di 123 saja, nomor-nomor ini yang lebih banyak dilirik masyarakat, dan peluangnya lebih besar, tingkat keterpilihannya tinggi, dan mestinya kondisi ini ditangkap oleh partai, perhitungannya ada pada suara terbanyak. Ada orang bilang, nomor tidak menjamin, tapi bagi saya itu menjamin karena psikologi pemilihnya. Tapi jangan salah di dalamnya ada lobbying, ada pertarungan ketat disana. PKS sebenarnya sudah sesuai untuk pemenuhan 30% bagi keterpenuhan calon legislatif perempuan, tetapi memang keterwakilannya rendah. Kalau bicara kuota 30%, perempuan menurut saya masih jadi pemanis saja. Mereka berjuang mencari pundi-pundi suara dengan minimnya basis sosial yang dimiliki tanpa banyak dukungan dari partai. Secara modal sosial, perempuan itu masih lebih rendah dari laki-laki, kecuali mereka jadi pimpinanan perkumpulan *fattayat*, *aisyah* dll itu bisa menggerakkan tingkatan basis masa bagi caleg perempuan PKS tetapi kalau dia tidak dalam posisi demikian akan sangat sulit. Sementara kalau bicara modal sosial sebagai dasar partai politik akan meloloskan dalam tahap seleksi, ya kita lihat dulu, bukan salah perempuan kalau basis sosialnya rendah, karena selama ini perempuan banyak yang tidak punya waktu ke arah itu, energi dan uang tidak tercurah kesana, karena *triple burdens* perempuan ya ...jadi peran-peran tradisional perempuan jadi lebih utama, ia memikirkan politik ya setelah dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domestik. Suara PKS terbatas karena mereka masih terkungkung ideologinya, sehingga sedikit susah mencari suara-suara yang nasionalis. PKS masih dianggap islamnya fundamentalis, bahkan ada yang bilang agak radikal, ini yang berebut dengan partai yang lebih moderat seperti PKB, PPP, sehingga islam moderat akan diambil oleh PKB atau PPP atau partai nasionalis lain, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. PKS ini stigmanya eksklusif jadi pemilihnya terbatas, lebih banyak pemilih dari area kampus daripada penduduk desa/kampung. Maka perlu ada evaluasi ditubuh partai, ada yang perlu diubah..”

Pinky Saptandaru, Antropolog Gender Universitas Airlangga Surabaya sekaligus Mantan Staff Ahli KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), juga ikut menyoroti :

“Ini seperti siklus yang berulang, mulai dari pertama kali 2004 sampai kemudian tahun 2009, kita mulai lagi 2014 dan sekarang tahun 2019, jadi hanya ada pengulangan saja pada satu proses di mana tidak ada satu hal kabar gembira kecuali dari sisi regulasinya saja. Partai dan caleg, kesiapan individu ataupun kelembagaan partai tidak cukup sungguh-sungguh, tidak cukup besar karena ketika mereka sungguh-sungguhpun mudah tidak ?kan gak mudah. Ketika mereka bekerja keras mudah gak ?enggak. Karena apa ?iklim politik kita sudah *kadung* kayak gini, *kadung* diwarnai politik uang, fitnah, *jegal-menjegal*, jadi dengan kondisi yang normal saja mereka perjuangannya berat, apalagi dengan ketidaksiapan dari pihak partai untuk betul-betul mendorong keterwakilan perempuan bisa terpenuhi. Di tambah dengan PKS Surabaya yang saya dengar juga mengusung tokoh publik seperti selebriti tentu akan lebih *njlmet* lagi pertaruhan. Banyak yang gak yakin, gak siap karena modalnya kecil. Kenapa saya berani mengatakan tidak siap ? karena kalau semisal sudah siap niatnya 2019 ikut pemilihan ya siapnya harus dari tahun 2014, sekolahnya harus 5 tahun, gak ada sekolah 3 bulan untuk masuk ke politik, itu bercanda namanya. Jadi kalau diproyeksikan 2024, ya sekarang sekolahnya. Usaha yang harus dilakukan untuk mendidik perempuan jadi calon-calon yang berkualitas ya...adalah entah dibuat sekolah perempuan politik, sekolah kader, entah apapun tapi betul-betul ada satu proses, suruh magang, ikut membantu yang sudah jadi. Perempuan-perempuan ini bisa belajar. Duduk, dengar, menyerap itu sudah sekolah. Lika likunya ke masyarakat harus seperti apa, harus paham. Coba kalau kita perhatikan betapa mereka *jor-joran* pasang baliho, yang menurut saya gak ada efektivitasnya. Partai manapun entah itu PKS juga sama, apalagi mereka punya ideologi islam yang masih kental, itu berpengaruh lho bagi keputusan-keputusan politik mereka, basisnya kecil dan sekarang banyak partai yang lebih tertarik ke partai nasionalis.”

Begitu juga Nurul Amalia, Divisi Teknis KPU Kota Surabaya mengatakan :

“Setiap partai politik punya sistem rekrutmen dan pertimbangannya masing-masing, namun memang kalau bicara akses bagi perempuan saya rasa memang semua partai tidak terkecuali PKS juga nampaknya masih menjadikan affirmative action itu bagi perempuan ya..hanya bekal untuk bisa ikut pemilu. Jadi akses yang diberikan untuk tingkat partisipasi bahkan hingga manfaatpun saya rasa pasti beda, untuk penomoran memang ada yang di nomor atas tapi gak banyak. Partai islam seperti PKS juga saya rasa masih menggunakan keislamannya untuk menjalankan sistem perpolitikan di internal partai meskipun saya pikir sudah sedikit bergeser ke politik praktis yang lebih moderat”

Berdasarkan pandangan dari Dwi Windyastuti, Pinky Saptandaru, dan Nurul Amalia, sistem rekrutmen dan penomoran calon legislatif memiliki pengaruh besar, baik bagi yang dicalonkan ataupun bagi pemilih yaitu masyarakat. Meskipun saat ini sudah banyak partai yang mengusung perempuan di nomor-nomor utama, namun tidak banyak berdampak pada hasil pemilu utamanya partai islam seperti PKS. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai untuk memberikan posisi strategis bagi calon legislatif perempuan dan dukungan penuh untuk bisa dilirik publik. Posisi laki-laki yang masih mendominasi sektor-sektor publik juga menjadi tantangan bagi perempuan untuk ikut bersuara dan bergerak, utamanya di politik yang menjadi ajang pertarungan menang kalah soal urusan modal politik ataupun sosial. Perempuan masih punya kendala untuk bisa membagi waktu secara adil antara urusan domestik rumah tangganya dengan urusan

publik. Tanggungjawab dan perannya pun memang tidak bisa dilepaskan dari posisi perempuan yang kemudian dianggap sebagai kaum nomor dua dari laki-laki karena dari segi pertimbangan partai PKS, modal sosial punya nilai jual lebih dari modal politik lainnya. Jadi ketika perempuan tidak memiliki modal sosial yang cukup, dia tidak akan dengan mudah lolos memenuhi syarat dari PKS. Di sisi lain, pada setiap gelaran pemilu, sudah hampir dipastikan sistem lobi-lobi yang dipakai untuk memunculkan calon-calon legislatif, ini yang menyebabkan politik transaksional masih kental dalam pesta demokrasi. Akses yang diberikan oleh partai tampak dari luar sama, namun di dalam internal kepartaian, sistem seperti itu sudah lazim dipakai, sehingga muncullah partai tanpa kader dengan sistem rekayasa politik yang dijalankan, ditambah dengan kecilnya suara PKS secara nasional juga didasari ideologi yang dipegang yaitu islam fundamentalis dan dianggap sedikit radikal, PKS Kota Surabaya pun stigma yang dipandang juga eksklusif yang menjadikan pemilih PKS terbatas.

Sistem rekrutmen dan pertimbangan politis yang dilakukan partai memang belum bisa adil antara laki-laki ataupun perempuan, masih dalam proses menuju regulasi yang bijak. Pemaknaan perempuan ditubuh partai, keberadaan perempuan belum menjadi hal vital dari partai, belajar dari periode pemilu sebelum-sebelumnya yang dianggap belum menyuguhkan hasil maksimal. Partai PKS juga tidak terlepas dari tokoh terkenal yang mencalonkan diri atau dicalonkan, mereka tidak punya modal politik tapi bisa lolos seleksi karena kepentingan partai bahwa modal sosial itu lebih menjanjikan. Terkenal/populer, dan punya banyak pengikut akan lebih memudahkan kemenangan di pemilu meskipun tidak memberikan jaminan 100%. Namun itu menjadi cara untuk PKS menarik simpati publik. Setiap caleg perempuan yang tidak punya cukup modal uang atau populer, setidaknya *basic* politiknyaharus dimiliki, *skill*nya tidak boleh kurang. Mengingat politik adalah arena yang keras, apabila tidak mempunyai kualitas, maka calon legislatif tidak akan mampu bersaing. Calon legislatif ketika sudah terpilih akan menjadi wakil rakyat, apabila kinerjanya nol, prestasinya nol, maka untuk apa menjadi wakil rakyat jika tidak berdampak besar bagi kemaslahatan banyak orang. Sehingga sangat disarankan adanya pendidikan politik bagi perempuan. Sementara, melihat lebih dalam soal regulasi yang dimiliki partai, dalil-dalil Al-Qur'an bagi partai islam tidak terkecuali PKS dianggap masih digunakan dan itu berpengaruh pada sistem rekrutmen atau dari cara pandang partai pada perempuan itu sendiri.

Sementara bagi KPU selaku penyelenggara pemilu, setiap partai politik memiliki ketentuan atau pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam menjaring calon legislatif, begitu juga bagi PKS Kota Surabaya. *A* 16 *tive action* yang dijalankan seluruh partai

masih digunakan sebagai pemanis guna memenuhi ketentuan syarat meloloskan partai mengikuti pemilu yaitu 30% kuota perempuan. Akses yang diberikan tentu juga berbeda baik partai nasionalis ataupun partai yang berangkat dari ideologi islam. Hal ini akan terlihat pada bagaimana sistem kepartaian dijalankan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Seluruh aspek baik akses, partisipasi, kontrol hingga manfaat yang dirasakan juga berbeda. Ini menindaklanjuti bahwa regulasi pemilu yang tidak pernah berubah sehingga dampak yang ditimbulkan dalam sistem pencalegan juga tetap diiringi dengan aktivitas-aktivitas politis yang kurang ideal.

2. Faktor Partisipasi

Achmad Suyanto, Ketua Umum Fraksi PKS Kota Surabaya, mengatakan :

“PKS Kota Surabaya tidak luput dalam upaya pengenalan caleg perempuan di mata publik untuk menopang basis sosialnya, dengan upaya mengajak caleg-caleg perempuan PKS bergabung bersama publik pada acara-acara tertentu, sebagai tokoh yang di dorong dihadapan anggota PKS lainnya yang memang sudah punya jam terbang tinggi. Kegiatan ini juga di mediakan artinya kita mengundang insan pers untuk ikut meliput jalannya acara. Melalui cara ini lah rating caleg ini bisa naik, sehingga mereka bisa memiliki basis sosial atau menambah basis sosial yang sebelumnya sudah mereka kantong masing-masing. Akses partisipasi yang kami kasih sama. Bahkan menurut saya ruang ruang media PKS banyak diisi oleh caleg-caleg perempuan. Kita memandang sama dan memberi akses sama. Akses itu ditunjukkan dengan unit partai terkecil yang itu di *endorse* oleh ibu ibu yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK), isinya pengajian ibu-ibu, dan program-program sosialita. Program PKS secara umum sama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. PKS *welcome* kepada ibu-ibu. Kalau bagi caleg perempuan, dia punya massa oke, dia bisa berkembang dengan massa itu. Kerja keras dari partai untuk menokohkan. Ini yang mungkin berbeda dengan partai lain. Kalau kita menghambat gak ada ceritanya lah, semua yang masuk baik baru atau sudah lama semua berjalan sama tidak ada kartu merah”.

Reny Astuti Anggota DPRD dari Fraksi PKS Kota Surabaya selama 2 kali periode, sekaligus Pengurus Partai :

“Dengan masuknya perempuan di parlemen atau struktur partai, sama. Gak ada pembeda laki-laki dan perempuan. perempuan tidak dibatasi, tapi substansi apa yang bisa diberikan tanpa melihat jenis kelamin. Ke depan akan berkembang, PKS tidak hanya di pencalegan tapi berlanjut ke tingkat dewan. Karena kita menyadari ada kebutuhan masyarakat yang perlu ditangani politisi perempuan. Kita paham juga perempuan itu berbeda struktur biologis, hingga cara berpikirnya dengan laki-laki, saya merasakan itu ketika PKS mengusung kebijakan perundang-undangan dan aturan lainnya. Jadi kuota 30% perempuan di parlemen saya yakin akan semakin memperkuat posis perempuan. karena publik juga tetap butuh peran perempuan untuk menyuaran aspirasinya. Kalau dilihat dari segi partisipasi perempuan, PKS menempatkan perempuan sesuai dengan potensi yang dimiliki, ini kalau dikepengurusan, artinya tidak selalu dibatasi posisi perempuan itu. Begitu juga di kenggotaan dewannya. Selagi perempuan mampu berkontribusi pada bangsa negara, PKS memberi ruang atau kesempatan lebar. Suara PKS secara umum memang belum besar, masih berjuang. Secara proporsi antara jumlah anggota dewan dengan yg lain n 17 salah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa

siapa yang dananya besar atau modalnya besar itu peluangnya besar. *Wani Piro* masih ada. Tapi sebenarnya harapannya publik sudah pintar, memilih berdaulat rakyat pintar seperti slogannya KPU.”

Berdasarkan penuturan Achmad Suyanto dan Reny Astuti, PKS memberikan akses partisipasi yang sama bagi perempuan maupun laki-laki. Upaya penghambatan perempuan masuk ke tubuh partai sebagai pandangan banyak orang adalah salah. PKS dengan pandangan islamnya tidak menyulitkan perempuan untuk terjun ke politik. Upaya pengenalan caleg perempuan di ranah publik juga dioptimalkan dan hampir keseluruhan agenda-agenda PKS banyak diisi oleh perempuan. Berbagai kegiatan pun juga digencarkan untuk melatih kemampuan berorganisasi dan berpolitik bagi seluruh calon legislatif ataupun kader yang telah bernaung sebelumnya, seperti Pos Wanita Keadilan ataupun program sosial lain, agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi wakil rakyat ketika terpilih. Membangun kedekatan dengan publik adalah sebuah keharusan, PKS memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk bisa bergabung dan berpartisipasi tanpa adanya marginalisasi satu sama lain. PKS menempatkan perempuan sesuai potensi yang dimiliki dan PKS berupaya keras dalam menokohkan calon yang diusung agar dapat dilirik masyarakat dan itu yang akan menjadi kunci keberhasilan PKS dalam mengisi jabatan di anggota dewan di samping modal politik yang telah dimiliki sebelumnya. Meskipun di dalamnya aktivitas seperti “*Wani Piro*” juga tidak dipungkiri pengurus partai, namun hal ini menjadikan masyarakat akan lebih pintar memilih siapa yang layak ataupun tidak dan melihat bagaimana rekam jejaknya. PKS juga meyakini meskipun keterisian kursi di parlemen kecil tapi setidaknya sudah cukup memberikan ruang kerja bagi perempuan menyuarkan aspirasi perempuan ataupun masyarakat yang termarginalkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

PKS Kota Surabaya sebenarnya memiliki kader-kader militan. Partai menggodok betul agar kader-kader PKS bisa diandalkan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Salah satu kemampuan yang penting dimiliki kader perempuan PKS saat berkecimpung di dunia politik adalah kemampuan *lobbying*, negosiasi dan kampanye. *Lobbying* dan negosiasi sangat penting bagi perempuan agar mampu berargumentasi dengan kawan maupun lawan politiknya, karena dengan kecakapan yang dimiliki menjadi modal bagus bagi caleg untuk bisa beradu opini dan solusi. Sedangkan kemampuan untuk mengkampanyekan diri sendiri pun diperlukan agar perempuan bisa membangun citra diri dan mempromosikan dirinya kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk memilih dirinya dalam pemilihan di internal partai maupun dalam Pemilu, sehingga tidak melulu mengandalkan dari upaya partai dalam membangun modal sosial untuk berlaga di kontestasi pemilu. Pelatihan kemampuan *lobbying*, negosiasi dan kampanye diwujudkan

dalam pelatihan seperti *character building*, *personal branding*, penokohan dan pelatihan kepribadian. Selama menjadi calon legislatif, tidak ada tumpang tindih antara peran laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada superioritas dalam menjalankan kepentingan, ditambah pandangan dari faktor akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh caleg perempuan ketika terjun di politik dibawah naungan PKS dipastikan sama.

Namun di sisi lain, Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender Universitas Airlangga Surabaya berpendapat :

“Peluang politik bagi perempuan rendah. Perempuan sebenarnya terbuka tapi peluang masih kecil itu tadi.. Beda dengan laki-laki. Caleg tanpa didukung partai itu ada, ketika jadi caleg ya itu urusan pribadi menang atau kalah urus sendiri, mereka berjuang sendiri. Partai hanya perahu atau kendaraannya. Partai butuh perempuan karena terbentur regulasi, tapi..setelah itu mereka dibiarkan sendiri, istilahnya ya kader tanpa dukungan politi. Kalau sudah begini ya partai masih setengah hati, supporting untuk regulasi saja, dukungannya belum full, kalau full ya di didik betul jadi kader. *Electoral threesold* bisa jadi gak terwujud bagi PKS kalau mereka tidak mengubah sistem kepartaiannya. PKS itu termasuk partai yang jarang mengangkut orang dari PKS sendiri, padahal ada kader PKS yang bagus tapi tidak diusung. Sebab, pundi-pundi duit gak ada, orang luar yang masuk kaya, maharnya ada, kalau dari kader kan tidak ada mahar politiknya. Apalagi kalau bicara kesetaraan gender banyak yang kurang paham, pendidikan politiknya kurang. Banyak perempuan tidak mengerti gender awareness, pokoknya saya diangkut partai karena saya perempuan, representasinya lebih kepada deskriptif atau simboliknya, saya perempuan saya nanti harapannya dipilih oleh perempuan kan gitu..itu aja, tapi jarang mereka memahami apa yang harus disampaikan, visi misi programnya juga tidak menyentuh pada gender sensitivitas. Apalagi PKS sebagai partai islam dengan memainkan politik praktisnya juga tidak menjamin ada penyetaraan gender dalam memaknai perempuan, yang penting laki-laki atau perempuan terisi sebagai syarat pemilu. Ketika partai berusaha menegakkan kesetaraan gender tapi tidak didukung dengan upaya penyadaran gender bagi caleg-calegnya maka apakah itu sudah menjamin partai sudah benar-benar pro gender juga ?belum tentu.Perempuan itu identik dengan pelit, perhitungan, itu membuat banyak pihak yang berurusan dengan tim sukses lebih milih laki-laki karena gak banyak mikir. Strategi lain ya perempuan harus mendukung perempuan, saling jadi tim sukses masing masing dari yang sudah punya modal sosial. Perempuan itu sebenarnya juga ada budaya bisu, manutan, bargaining positionnya masih lemah, itu tantangan bahkan juga hambatan, tapi yang pasti perempuan harus bisa kuat dalam berpolitik, harus pintar, agar tidak jadi pelengkap penderitaan”.

Pinky Saptandaru, Antropolog gender Universitas Airlangga Surabaya sekaligus Mantan Staff Ahli KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) :

“Beberapa kali saya ngisi materi buat partai, semua sepakat bahwa kondisinya seperti itu, lalu cara promosi yang salah juga. Habis uang banyak untuk hal yang gak penting, misal baliho besar, apa dia layak dipilih, programnya apa , paling masyarakat hanya lihat “ohhh..dia nnyaleg ya”. Satu-satunya cara ya turun di dapil. Gak semua partai *ngopeni* calegnya. Nyarinya buat caleg aja *last minute*. Belum berpikir 30 % jadi tapi 30% utk didaftarkan saja. Itu bahaya, kemungkinan menang ya kecil. Ketika politik uang gila-gilaan ,makin terpinggirkanlah kepent 19 perempuan. yang potensial adalah yg pengalaman. Itu tidak ada satu sistem A belajar dari B atau sebaliknya. Ada nafsu berkuasa. Partai tanpa islam saja patriarkinya kuat ditambah Islam ya tambah lagi, pasti

ada dalil-dalil atau penanaman pada perempuan-perempuan untuk ngalah, mengutamakan laki-laki walaupun pada saat bersamaan laki-laki ini sebetulnya gak oke oke banget, tapi karena dia laki-laki akhirnya diutamakan oleh partai dan masyarakat. Publik ini kan juga sudah terbentuk cara berpikirnya juga patriarki dominan. Orang dipilih karena popularitas, artis banyak yg muncul, muncullah kemudian partai-partai bertabur artis supaya mudah mendulang suara kenapa ?ya karena terkenal, tapi apakah terkenal itu artinya dia capable ? belum tentu. Tapi partainya gak mau susah payah, cari yg sudah punya massa, tingkat keterpilihannya pasti besar, dan itu dianggap sebuah keuntungan. Tapi nanti dia duduk di DPRD mau ngapain ya gak dipikirkan. Secara kuantitas belum tercapai, secara kualitas juga demikian ,makin sulit. Jadi kuantitas saja gak terpenuhi, kualitasnya juga susah. Karena yg duduk di kursi dewan terbatas, cara dia memperjuangkan kursi-kursi gender juga sangat sulit selain karena kapasitasnya dia yag terbatas. Bisa belajar kalau mau belajar, tapi berapa banyak yang mau belajar ?akhirnya nganddelin staff ahlinya staff khususnya dan kadang-kadang saya berpikir “ya mendingan staffnya yang jadi daripada sebaliknya. Laki-laki juga blm tentu berkualitas, dua-duanya juga perlu dipertanyakan tetapi tingkat kemudahannya kan lebih baik laki-laki. Ideologi partai itu masih bias gender, artinya walaupun di dorong ada caleg perempuan, mereka pastinya sudah tahu juga peluang mereka untuk menang juga gak begitu besar karena dilihat track recordnya. Partai yang tidak pakai mahar saja kesulitan apalagi yang pakai mahar”

Nurul Amalia selaku penyelenggara pemilu, Divisi Teknis KPU Kota Surabaya mengatakan :

“Saya sebagai perempuan juga sadar kok bahwa *affirmative action* tidak terus memaksa harus 30%, walaupun tidak mampu ya sudah, gak apa apa. Tetapi dalam proses itu kasihlah peluang perempuan itu untuk bersaing lebih dari yang lain. Tapi juga banyak anggapan kalau perempuan dikasih peluang lebih saja belum bisa menyaingi laki-laki apalagi dikasih beban lebih. Konkritnya pandangan masyarakat dan sesama politisi atas keberadaan *affirmative action* bagi perempuan, menurut saya juga masyarakat saat ini kurang menghargai *affirmative* itu, tidak terkecuali ya partai politik. Buktinya kalau sama-sama pintar atau sama sama punya partisipasi sama selalu laki-laki berpendapat “cukup perempuan 30% saja”, loh kok gt ?mestinya kan enggak, kalau kompetisi biasa, gak harus perempuan dibatasi 30%, ya sudah biarkan mengalir di kondisi apapun, mislanya di kepengurusan, rekrutmen tenaga PPK/PPS, it tidak perlu dibatasi30%. Tapi kasih ruang yang sama dan metode sama. Tapi yang perlu dipikir lagi adalah ketika jumlah perempuan itu minim, maka dia dikasih keringanan lebih daripada laki-laki harusnya begitu. Jadi kesadaran terkait gender perlu ditumbuhkan agar kesempatan perempuan bersaing di politik lebih besar. Tidak hanya bagi kaum perempuan saja tapi laki-laki juga. Kalau laki-laki yang menyuarakan ada perhatian lebih, kalau perempuan sudah biasa. Dan kalau dilihat dari konteks ruang-ruang publik jumlah perempuan memang tidak bisa banyak, ini tentu juga pengaruh stereotip dari publik kepada perempuan bagi mereka yang menggunakan dalil-dalil atau hadist dalam Al-Qur’an tak terkecuali partai Islam yang mungkin juga diterapkan bagi PKS. Seringkali perempuan punya keterbatasan, rapat tengah malam, budaya masyarakat belum bisa kalau menerima perempuan itu pulang malam padahal pulang malam itu bukan berarti kluyuran misalnya harus ke masyarakat, sosialisasi, jaring aspirai jadi waktu banyak dihabiskan di lapangan, nah publik masih banyak yang beranggapan kalau perempuan pulang malam itu gak baik. Akhirnya orang membatasi diri. Saya juga belum melihat secara terang-terangan atau jelas ada partai berkampanye terkait gender. Apapun, islam ataupun nasionalis, tidak terkecuali PKS. Partai | 20 ada yg serius menyetarakan gender, jadi dibiarkan berjalan begitu saja”.

Berdasarkan pandangan Dwi Widyastuti, Pinky Saptandaru dan Nurul Amalia, perempuan butuh dukungan serius agar mampu berkiprah dengan nyaman di tengah masyarakat. Dukungan yang besar bisa datang dari masyarakat, lingkungan, dan terutama yang paling penting adalah keluarga. Dukungan keluarga sangat menentukan, karena keluarga merupakan yang terdekat dan perempuan berdasarkan nilai sosial budaya, serta politik mempunyai tanggung jawab besar dalam mengurus keluarga. Sehingga peran ini harus diseimbangkan, ketika perempuan memilih jalur politik untuk bekerja. Berbeda dengan laki-laki yang secara luas dipahami oleh publik yang secara 'kodrat' aktivitas mereka adalah di wilayah publik. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah dengan peranan-peranan yang ditasbihkan oleh sosial budaya bahkan unsur politik sehingga segala aktivitas bagi kaum laki-laki di luar rumah adalah wajar. Berdasarkan stereotip ini, diyakini kebenarannya bahwa ada kepribadian perempuan yang secara nyata sedikit banyak menyulitkan untuk terjun di politik. Bentuk ruang partisipasi yang diberikan kepada calon legislatif perempuan dan laki-laki itu masih berbeda. Upaya partai untuk mengenalkan caleg perempuan juga masih sangat kurang. Kebanyakan mereka berjuang sendiri. Sekalipun PKS mengklaim bahwa semua calegnya didukung penuh, tidak ada jaminan bentuk dukungannya maksimal atau hanya sebatas pengenalan, bahkan ketika partai juga mengundang insan media untuk meliput aksi caleg berorasi, basis sosial mungkin bisa naik, masyarakat bisa lebih mengenal tapi kapabilitasnya belum tentu publik paham betul.

Keterpilihan perempuan yang duduk di DPRD dengan jumlah kecil dianggap publik belum sepenuhnya mampu menahkodai kebutuhan perempuan untuk bisa bergabung di politik, karena partai tidak pernah memberikan jaminan bahwa caleg caleg perempuan yang mencalonkan diri bisa terpilih semua. Sehingga keberadaan kuota 30% hanya stagnan di pemilu saja sebagai syarat PKS mengikuti proses pemilu dan bersaing dengan partai-partai lain. Jika berdasarkan data KPU Kota Surabaya, Partai Keadilan Sejahtera dalam lingkup DPRD Kota, menempatkan calon legislatif perempuan untuk periode tiga kali pemilihan legislatif, rinciannya periode 2004-2009 sebanyak 14 caleg perempuan dan 33 caleg laki-laki, 2009-2014 17 caleg perempuan dan 33 caleg laki-laki, dan 2014-2019 18 caleg perempuan dan 37 caleg laki-laki. Namun, komposisi legislatif perempuan di DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS berdasarkan pemilihan umum 2009-2014 dan 2014-2019 adalah laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang. Sementara itu untuk partai besar lainnya seperti PDIP periode 2009-2014 adalah laki-laki 6 orang dan perempuan 2 orang, periode 2014-2019 laki-laki 10 dan perempuan 5 orang, Golkar periode 2009-2014 laki-laki 5 orang dan perempuan 1, periode 2014-2019 laki-laki 1 orang dan

perempuan 3 orang, dan Demokrat periode 2009-2014 laki-laki 9 orang dan perempuan 7 orang, periode 2014-2019 laki-laki 2 orang dan perempuan 4 orang. PKS Kota Surabaya masih kalah saing dengan partai lain meskipun PKS termasuk partai yang sudah lama berkecimpung dalam sistem demokrasi Indonesia.

Mengacu dari misi untuk meloloskan diri mengikuti pemilu, perempuan itu sekarang "*sing penting dipasang sing penting 30%*". Asal lolos adiminstarsi, ditempatkan di manapun tidak masalah. Partai islam ataupun nasionalis tidak terkecuali PKS adalah sama. Partai masih setengah hati, tapi banyak partai lain yang kemudian berdalih sulit mencari perempuan, ini yang menjadi pokok permasalahannya. Berangkat pada kondisi itu, jika partai sudah tahu itu sulit kenapa tidak diberi peluang lebih bagi perempuan, harusnya partai menyadari dan melakukan tindakan atau aksi lebih dari sebelumnya agar perempuan juga banyak yang terpilih mewakili kursi partai di DPRD. Intinya adalah perempuan itu perlu diperjuangkan, karena bagaimana mungkin orang akan memperjuangkan nasib perempuan jika bukan perempuan itu sendiri. Sampai saat inipun banyak partai yang orientasinya cukup 30% saja perempuan tidak perlu lebih, perempuan cukup sebagai pendukung saja. *Affirmative* perempuan itu harusnya dibutuhkan ketika posisi tawar perempuan rendah atau sedikit, tapi jika sudah banyak, partai tidak boleh membatasi. Partai harus benar benar ada kemauan besar tidak menjadikan perempuan sebagai pelengkap atau pemanis pemilihan umum, tapi gebrakan apa yang bisa memberi ruang besar bagi perempuan bisa bebas berekspresi di politik dengan membangun mental dan pola pemikiran matang bagi perempuan begitu juga tanpa takut intimidasi atau termarginalisasi dari maskulinitas politik. Melalui klaim dari pihak PKS Kota Surabaya yang menganggap telah memberikan kontribusi besar bagi calon legislatif perempuannya cukup tinggi dalam mendulang basis sosial, masih harus ada yang perlu dievaluasi apakah partai ini betul secara sadar dan yakin bahwa perempuan juga menjadi prioritas atau sebatas upaya untuk pemenuhan 30% keterwakilan agar bisa ikut pemilu, karena upaya yang dilakukan partai tidak sebesar problematika yang ditimbulkan di lapangan, disamping itu juga harus ada semacam terobosan. Setelah masa pencoblosan, maka harus dibentuk tim untuk mengevaluasi hasil pemilu, menggunakan pihak luar agar lebih netral dan transparan. Harus ditelaah seseorang menang atau gagal berdasarkan apa, apakah rekrutmen partai yang salah, bagaimana dengan faktor dinasti politiknya, harus dikupas tuntas, dan hasilnya harus berani disampaikan kepada masyarakat. Sementara partai juga harus *legowo* dengan hasil itu dan menjadikannya sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi kebijakan internal partai sendiri, begitu juga bagi caleg yang gagal bisa

belajar dari hasil tersebut untuk meningkatkan apa yang sekiranya bisa ditingkatkan ketika mereka ingin mencalonkan diri kembali di kontestasi berikutnya.

3. Faktor Kontrol

PKS Kota Surabaya memandang penting keberadaan perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan baik skala kecil ataupun yang lebih luas yaitu pemerintahan. PKS menganggap bahwa partainya sudah menerapkan *GAD (Gender and Development)* memposisikan laki-laki dan perempuan sejajar atau berjalan beriringan dalam sumber-sumber dan program pembangunan berkelanjutan. Seperti halnya penjelasan Achmad Suyanto Ketua Umum PKS Kota Surabaya :

“Kalau masyarakat bilang PKS gak pro perempuan, lha wong yang jadi anggota DPRD juga ada yang perempuan, ya gak mungkin lah kalau kita gak pro gender. Bisa dilihat dari faktor aksesnya kita kasih ruang penomoran juga paling atas kebanyakan perempuan. Ruang media kami juga banyak diisi oleh caleg-caleg perempuan. Nah, kalau dari segi penguatan karakter, PKS itu adalah partai yang pro family, pro pada pembangunan keluarga. Kita juga pro gender. Unit terkecil dari masyarakat yang menurut saya ini desain lingkungan yang paling stabil dan andalan masyarakat, oleh karena itu kalau tidak ada perempuan rasanya kok tidak lengkap. Karena PKS itu punya tagline “Keluarga Sakinah” ada suami, istri dan anak. Kalau tidak ada yang mengetahui unsur domestik dan peran perempuan sebagai soko guru bagi generasi masa depan terasa tidak lengkap. PKS itu juga punya program andalan namanya Program Keluarga Harapan, sampai sekarang dipakai oleh Kementerian. Karena sub terkecil dalam program itu adalah ibu dan anak. Supaya perempuan juga punya kontrol sama dengan wilayah garap laki-laki, ya wilayah garap perempuan kita kasih ruang luar biasa biar mereka bisa mengeksplor semaksimal mungkin, ya itu biar adil”.

Reny Astuti, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Kota Surabaya selama 2 periode, Pnegurus Partai sekaligus calon legislatif 2019 berpendapat sama :

“Saya dengan teman-teman di partai punya prinsip yang sama, begitupun calon legislatif yang ingin bergabung dengan kami ya harus sesuai dengan pandangan politik kami. PKS sebagai partai dakwah punya perhatian besar pada ketahanan keluarga, di realisasinya PKS ada bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Artinya, bahwa perempuan perempuan PKS ketika berkiprah di politik atau masyarakat itu sebagai ajang ia melakukan peran perluasan dia sebagai perempuan. Sementara ada peran asasi yang harus tetap dijalankan perempuan sebagai istri dan ibu. Dia tetap bisa menjalankan peran politisnya yang manfaatnya tidak hanya bagi keluarga tapi juga sekitarnya. Kita juga ikut mendampingi teman-teman caleg yang ingin menawarkan program pembangunan ke masyarakat, jadi kita tidak *cul-culan*”

Berdasarkan penuturan Achmad Suyanto dan Reny Astuti, PKS Kota Surabaya melakukan dakwah secara masif kepada masyarakat sebagai agen pembangunan mulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Prinsip yang dari awal dipegang oleh PKS ini juga sudah menjadi mufakat bagi siapa saja yang akan bergabung. PKS menganggap partainya adalah pro gender. Perempuan m 23 | peran signifikan dalam menyukseskan

pembangunan berkelanjutan utamanya dengan perempuan terjun ke politik, bersanding dengan laki-laki untuk menjadi bagian dari penyambung lidah masyarakat. Ketika perempuan memutuskan bergabung di pemerintahan maka ini menjadi cara agar posisi perempuan semakin kuat dan mengembangkan perannya di lingkungan sosial yang lebih luas. Apabila perempuan sudah mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan bahwa perempuan bisa berjalan beriringan dengan pembangunan dan masuk menjadi penyokong pembangunan itu sendiri. Sehingga akses kontrol yang diberikan PKS kepada perempuan terbuka lebar dan tidak menyudutkan satu sama lain. PKS juga ikut memberikan pendampingan bagi seluruh calon legislatifnya dalam menyampaikan program-program kerja.

Sementara itu, Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender Universitas Airlangga Surabaya, menyatakan :

“Partai islam seperti halnya PKS Surabaya ini saya rasa memang belum sepenuhnya responsif gender, karena partai yang punya ideologi islam kemudian terjun ke politik pasti punya pandangan yang berbeda, partai yang bukan berangkat dari islam saja sudah banyak yang tidak responsif gender apalagi ini, maka perlu kiranya perempuan caleg itu diwadahi dengan baik, agar mereka juga bisa memberikan kontribusinya bagi politik itu sendiri. PKS yang notabene juga sebagai partai dakwah harusnya bisa menjalankan dakwahnya secara lebih flexible dan menyentuh banyak masyarakat”

Pinky Saptandaru Antropolog Gender Universitas Airlangga Surabaya sekaligus Mantan Staff Ahli KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengungkapkan :

“Dari segi akses, partisipasi, kontrol, hingga manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki itu berbeda, dominasi masih ada pada laki-laki, yang paling diuntungkan masih laki-laki, partai banyak yang tidak mengakui padahal saya menemukan banyak seperti itu. Penguasaan bidang atau aspek apapun di politik juga masih laki-laki, perempuan bisa tapi gak banyak, mereka tidak punya kuasa lebih, kontrolnya pada pertahanan politik juga lemah, jadi kalau ditanya apakah calon legislatif perempuan dan laki-laki memiliki kontrol yang sama dalam aktivitas politiknya ?jawabannya tidak, apalagi partai islam seperti PKS ini yang masih kuat dengan islamnya”

Nurul Amalia, Divi Teknis KPU Kota Surabaya juga menyoroti :

“Jumlah perempuan di politik dari Partai islam dan salah satunya PKS, memang jumlahnya minim. Jumlah minim itu karena pertama beban perempuan secara nyata di publik adalah berat, artinya kalau perempuan itu mau berkarir dan dia sudah berumah tangga pasti berpikir ..nanti anakku gimana ? tetapi kalau laki ya sudah berkarir saja, nah ini ada beban mental atau secara fitrah bagi perempuan. Dari beban itulah perlu ada *affirmative* perempuan dan ini efeknya juga akan lari kepada penguasaan aspek atau bidang yang menjadi bagiannya selama menjadi calon legislatif, selain itu juga cangkupan untuk meraih mangsa juga tidak banyak, lebih ke arah perkumpulan ibu-ibu fatayat atau kampus-kampus sebagai t 24 dakwahnya, sehingga hasil pemilu tidak

banyak yang memuaskan, apalagi sekarang sudah banyak yang beralih ke pandangan moderat”.

Berdasarkan penuturan Dwi Widyastuti, Pinky Saptandaru dan Nurul Amalia, banyak partai yang tidak responsif gender tidak terkecuali partai islam seperti PKS. Penguasaan bidang di ranah politik masih didominasi laki-laki, perempuan banyak yang menjadi pendamping atau pelengkap semata, tidak memiliki kuasa lebih dan bentuk pertahanan yang lemah, hal ini dapat dilihat dari segi fisik ataupun psikologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Tanggungjawab yang diemban perempuan ketika berkarir dan mendedikasikan dirinya sebagai ibu rumah tangga adalah tantangan bagi perempuan yang di sisi lain juga bisa menghambat kinerja perempuan ketika tidak mampu membagi tenaga, waktu, dan pikiran di ruang publik ataupun domestik dengan baik. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada cakupan meraih simpati publik ataupun massa dalam pemilihan umum dengan skala yang lebih sempit atau kecil, hal ini didasari pada pandangan masyarakat yang sudah lebih moderat atau beralih ke nasionalis. Sementara posisi PKS yang juga merupakan partai dakwah, disarankan lebih luas lagi cakupannya dan tidak mempersempit ruang gerak. Sehingga perempuan yang menjadi caleg ataupun kader yang sudah jadi, mereka akan mampu berbuat lebih bagi masyarakat.

3 Faktor Manfaat

PKS Kota Surabaya berdiri pada dua sisi, yaitu islam sebagai ideologinya namun berjalan pada politik praktis, orientasinya adalah pada kemenangan di pemilihan umum. Jika mengacu pada dua pandangan ini, maka bagaimana PKS bisa menjalankan fungsinya dengan benar karena sudah mencampurkan islam dan politik sebagai ideologi partai ? Apakah cara pikir mengenai makna perempuan di politik juag masih membawa kultur islam yang sangat kental bahwa perempuan cukup sebagai makmum dan kedudukan di politik bukan sesuatu yang mewajibkannya, karena politik masih ranahnya kaum laki-laki ? karena kondisi ini akan menentukan posisi perempuan sebagai calon legislatif dan manfaat yang mereka dapatkan.

Achmad Suyanto Ketua Umum Fraksi PKS Kota Surabaya menerangkan :

“Kita memberi sintesa kepada publik, ya tidak harus ikut logika publik bahwasanya PKS itu tetap partai yang menawarkan islam sebagai solusi. Oleh karena itu warna islamnya memang mengental tetapi aktualisasi dan artikulasi kepublik disesuaikan dengan kehenda publik, bukan istilahnya harus mengikuti logikanya PKS, tapi logikanya publik. Kalau logikanya PKS yang doktrinasi, tapi kita ikut publik, mereka yang menentukan apa yang dibutuhkan. Namun perlu digaris bawahi bahwa perempuan di politik itu juga tidak apa apa, sekalipun 25 rka punya tantangan berpolitik karena harus n bekerja di ranah publik. Memang kadang

benar dan kadang tidak benar, jika posisi perempuan itu banyak hambatan, segala sesuatu dilihat konteksnya. Nah kalau Nabi menyebut wanita adalah pimpinan di wilayah garapnya maka kita kasih ruang pada wilayah pimpinannya itu. Well prepare lho ibu-ibu, apakah stereotip ini terus dipertahankan ya tidak juga, kita tidak akan memisahkan itu. Kita mengacu pada kajian dna pustaka jaman dahulu yang membenarkan ada kok jadi tentara jaman nabi, yang menyelamatkan nabi, berarti ibu-ibu boleh perkasa, jadi stereotip apakah perempuan tidak boleh menyentuh ruang-ruang publik ya boleh. Bagi saya boleh. Selama peran dan fungsiya tidak menegasikan hambatan perempuan di politik ya kenapa tidak, kan begitu. Kalau maslahe manfaat yang bisa dinikmati caleg legislatif ya banyak mbak..mereka pasti dapat pendidikan politik, kepemimpinan, dll apalagi kalau sudah terjun di kegiatan partai dan bertemu publik itu akan kelihatan”.

Reny Astuti Anggota DPRD Kota Surabaya untuk 2 periode sekaligus Pengurus partai, juga menjelaskan posisi PKS antara ideologi islamnya dan politik praktis bahwa :

“PKS tidak melihat al-hadist atau ayat-ayat al-qur’an sebagai pembatas ruang gerak perempuan. kita tidak beracuan kesana, PKS memandang islam flexibel, menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kalau sekarang saya merasakan hambatan berpolitik yang dulu sering digadang-gadang publik yang kemudian menimbulkan labelisasi pada peran dna fungsi laki-laki atau perempuan, itu semakin teratasi, perempuan sebenarnya paling punya peran di kontribusi keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan berpolitik, sah-sah saja. Ketika perempuan sudah berkeluarga, dia akan lebih nyaman kalau sudah dapat support dari keluarga secara langsung. Sehingga tantangan sekeras apapun dia akan siap. Dan di sini PKS sebagai partai yang juga punya program keluarga harapan jadi akan sangat bermanfaat bagi perempuan-perempuan untuk bergabung menjadi caleg, karena kita *support* betul”

Berdasarkan penuturan Achmad Suyanto dan Reny Astuti, PKS sejauh ini sebagai partai islam memandang perempuan bisa berpolitik. PKS menganggap posisinya tidak membatasi ruang gerak perempuan jika beracuan pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari hartamereka.*” Ayat surat tersebut diperkuat dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi “*Bagi para wanita, mereka punya hak yang seimbang dengankewajibannya menurut cara yang benar. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.*” Selain ayat, ada juga hadits Rasulullah SAW terkait dengan posisiperempuan, yang beliau bersabda: *Tidak akan pernah beruntung keadaan suatukaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.*” (HR.Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i). PKS beracuan pada kisah-kisah zaman Rasulullah bahwa perempuan bisa kuat, perempuan bisa menjadi ujung tonggak suatu pemerintahan yang kokoh, sehingga PKS tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan (pro gender) begitu juga pembinaan calon legislatif perempuan terus

dilakukan agar mendapatkan manfaat yang sebagaimana diharapkan seperti pendidikan politik maupun kepemimpinan dalam berorganisasi ataupun di pemerintahan.

Sementara itu, Sementara Dwi Windyastuti Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender Universitas Airlangga Surabaya mengatakan :

“Partai islam tidak bisa lepas begitu saja dengan ideologi islamnya, apalagi yang eksklusif seperti PKS. Mereka menggunakan dasar islam dalam menjalankan politiknya, kan ada di dua titik yang dipakai, islamnya dan politik praktisnya. Kalau manfaat pasti ada tapi belum signifikan, banyak yang tidak mendapatkan pendidikan politik ideal selama menjadi calon legislatif ataupun selama mengikuti program-program partai. Bagi partai, perempuan sudah pasti penting, penting untuk memenuhi unsur regulasi pemilu. sama lah, saya kira, tapi perempuan di manapun itu akan tetap dibutuhkan meskipun tidak banyak perannya”

Pinky Saptandaru Antropolog Gender Universitas Airlangga Surabaya sekaligus Mantan Staff Ahli KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) :

“Manfaatnya ya banyak harusnya yang bisa diambil, tapi kan sejauh ini gak banyak yang direalisasikan. Caleg-caleg perempuan yang saya temui juga banyak yang kurang paham bagaimana berpolitik yang baik, pendidikannya kurang, asal masuk, asal jadi, ya..ini jadi tugas partai gimana cara menggodok calon yang diusung atau kader-kadernya itu bisar lebih kompeten. Kalau masalah dalil atau apapun itu seklaai lagi saya tegaskan pasti masih dipakai, meskipun sudah mulai agak luntur, karena kebutuhan politik”.

Nurul Amalia Divisi Teknis Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Surabaya :

“Saya beberapa kali bertemu aktivis perempuan, mereka menyampaikan bahwa harusnya tidak ada hubungan dalil-dalil islam dengan urusan politik. Menyuarakan hak atau mewakili siapapun, gender tidak begitu berpengaruh. Hadist itu tidak berpengaruh, di islam pun tidak di larang. Perempuan berkompetisi tidak ada larangan. Tapi mungkin kalau di partai islam seperti PKS masih ada karena menggunakan fatsun-fatsun politik ya kalau tidak salah, ya mungkin ada pertimbangan tersendiri, yang pasti kalau sekarang sudah banyak pihak yang tidak beracuan pada dalil-dalil yang memarginalkan perempuan. Kalau manfaat yang bisa mereka peroleh selama jadi caleg pastinya ada, dari kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti pasti sudah bisa dirasakan”

Berdasarkan pandangan Dwi Widyastuti, Pinky Saptandaru, dan Nurul Amalia, dalil di dalam Al-Qur'an ataupun hadist-hadist tidak berpengaruh pada posisi perempuan untuk terjun ke arena politik. Posisi perempuan yang menjadi pertimbangan besar untuk masuk ke ranah publik harus dibawa dengan cara yang benar. Tidak menyudutkan atau memarginalkan dengan stereotip bahwa perempuan cukup sebagai makmumnya laki-laki. Perempuan maupun laki-laki memiliki derajat yang sama, yang membedakan adalah kemampuan kinerja yang bisa ditunjukkan. Hal ini sebagai bahan evaluasi bagi PKS Kota Surabaya, karena apa yang telah mereka berikan kepada calon legislatif perempuan dari

segi manfaat dinilai belum signifikan, maka sudah selayaknya partai memberikan pembinaan dan pemberdayaan atau pendidikan politik yang baik kepada calon legislatif perempuan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dijalankan partai juga harus berdampak baik bagi perkembangan mental dan pengetahuan perempuan dalam berpolitik. Tidak asal menjalankan sistem politik kepartaian, tapi melupakan tanggungjawab partai dalam mendidik calon legislatifnya.

Berdasarkan empat poin dalam kajian pemaknaan perempuan di tubuh PKS Kota Surabaya, dilihat dari 4 faktor yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, dapat dipaparkan bahwa pemaknaan PKS Kota Surabaya terhadap calon legislatif perempuan adalah menggunakan dua ideologi sekaligus, Islam dan politik praktis. Partai juga dianggap masih “setengah hati” dalam memaknai urgensi perempuan. PKS Kota Surabaya memiliki paradigma sendiri yang berbeda dengan partai lain tentang sistem rekrutmen caleg perempuan untuk diusungnya. Sehingga, dengan tujuan pemenuhan unsur regulasi pemilihan umum, partai PKS ada yang mengusung kader dari ranah internal dengan faktor kedekatan atau kepentingan tertentu dan kebanyakan dari eksternal partai sendiri yang justru menjadi tindakan pragmatis, yang dianggap bisa membantu mesin partai lebih maju dan berkembang karena mereka punya modal politik yang lebih mantap dengan bantuan sistem rekayasa sosial politik yang diterapkan PKS. Di samping itu, proses rekrutmen yang kurang transparan dengan berpatokan pada “harga tawar” seorang caleg untuk bisa diterima dalam partai politik. Praktik “*Wani Piro*” tidak dapat dipungkiri menjadi budaya yang dilegalkan dalam sistem pemilu, sehingga yang tidak *capable* pun dengan modal politiknya bisa menjadi wakil rakyat tanpa harus bersusah payah. Adapun yang dikejar partai adalah kuantitas, kualitas sebagai nomor dua. Upaya pengenalan caleg di depan publik juga tidak banyak menghasilkan caleg-caleg dengan basis sosial tinggi, bahkan perempuan banyak yang harus berjuang sendiri untuk mencari massa. PKS secara tidak langsung juga tidak menjanjikan perempuan bisa lolos dengan mudah untuk keterpenuhan kuota di anggota dewan, hal ini dikarenakan kuota 30% hanya sebatas upaya partai politik untuk bisa mengikuti pemilihan umum, tindak lanjut untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender di parlemen belum sepenuhnya dilakukan. Berbagai kegiatan partai disuguhkan bagi perempuan tapi banyak caleg yang belum menikmati, ruang-ruang publik tidak banyak yang mampu ditopang, sehingga kontrol terhadap politik juga masih kecil. Demikian, keberadaan perempuan untuk maju ke jalur politik masih ditemukan tantangan dan hambatan agar partai politik merespon dengan baik dan mau menjadikan kaum perempuan sebagai kadernya yang berkualitas serta sama di mata hukum atau pemerintahan tanpa adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan itu

sendiri dari segi peran dan fungsi yang harus dijalankan ketika duduk di kursi dewan atau kepartaian. Akhirnya politik hanyalah soal kemas, perempuan boleh berpolitik tapi tidak memiliki kewajiban berpolitik, sehingga segala keputusan masih didominasi kaum laki-laki, perempuan sebatas pendukung, ada atau tidak bukan masalah besar karena selama ini perempuan masih terus menjadi manusia nomor dua dan sistem kepartaian yang belum melegalkan perempuan untuk banyak menduduki kursi strategis karena posisi laki-laki yang lebih memiliki *bargaining position* matang dibanding perempuan.

Jika dikorelasikan dengan Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blummer, maka posisi perempuan masih sebatas simbolisasi politik yang berada pada posisi tengah antara penting dan tidak penting. Hal ini mengacu pada paradigma yang telah dipegang partai, bahwa ketika partai ingin lolos mengikuti pemilihan legislatif, ada dua hal yang harus dilakukan dalam upaya pengisian 30% keterwakilan perempuan di politik yaitu sebagai pilihan rasional, di mana partai mau tidak mau harus mengisi kuota perempuan jika ingin meraih suara dan sebagai kewajiban berupa tindakan *affirmative* dari penyelenggara pemilu tidak lain adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar partai tidak mendapatkan sanksi politis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kuota 30% bagi perempuan dipandang partai masih sebatas pelengkap kedudukan laki-laki yang notabene memiliki kuota lebih besar (mendominasi). Labelisasi atau stereotip pada kemampuan perempuan di politik sejauh ini sudah masuk dalam pengkonstruksian yang menyebabkan harga tawar perempuan rendah dan berdampak pada minimnya penguasaan dan kontrol diri dalam aspek pembangunan, sementara kedudukan laki-laki tetap memegang kuasa tinggi untuk mengisi ruang-ruang publik. Pimpinan partai sebagai pemegang kendali dan pengambil keputusan tertinggi tentu punya peran strategis dalam memberikan pandangannya atas urgensi perempuan bagi partai dan bentuk pemaknaannya, karena sejatinya pengkonsepsian itu berasal dari kebijakan-kebijakan internal partai yang sudah di matangkan dalam rapat-rapat kepartaian dan ideologi yang sudah menjadi dasar pemikiran dalam menerapkannya. Begitu juga yang dilakukan pengurus partai ataupun kader yang harus mengikuti aturan internal partai dalam mengimplementasikan kebijakan dan berpandangan selaras pada visi dan misi yang telah dibentuk.

Perempuan menerima posisinya sejauh ini sebagai makhluk kelas dua yang diminta untuk secara tidak langsung patuh pada laki-laki. Bahkan perempuan menganggap hal itu sebagai kodrat yang sudah harus diterima karena terlahir sebagai perempuan. Bentuk penginternalisasian nilai-nilai tersebut diterima perempuan sebagai sebuah kewajiban. Perempuan dianggap lemah dan “manut” sebagai individu yang semestinya lebih banyak berkecimpung di ruang domestik (rumah tangga), akhirnya perempuan dijadikan sebagai

objek yang dimaknai begitu adanya tanpa melihat secara objektif kebenaran seharusnya, yang secara objektif menjadikan perempuan di posisi tidak menguntungkan ini akan berakibat buruk yaitu perempuan terus-menerus menjadi subordinatnya laki-laki. Sementara itu, ketika partai telah meyakini secara subjektif memandang kondisi itu sebagai sebuah kelayakan bagi perempuan dan melalui cara itu menjadikan partai tidak akan bergantung lebih bagi perempuan. Meskipun secara politis, hak perempuan untuk bergabung di ruang publik dan berperan di pembangunan dengan turun langsung di arena politik adalah sebuah peluang yang harus dipenuhi, direalisasikan dan dijamin dalam undang-undang. Pemaknaan yang mengarah pada skeptisme dan menempatkan perempuan pada situasi “kurang penting” ini disempurnakan berdasarkan apa yang ditemui setiap harinya di lingkungan interaksi yang mendukung kondisi perempuan yang seperti itu sebagai ruang dalam membangun komunikasi, berpikir, dan berperilaku. Teori interaksi simbolik melihat representasi perempuan sebagai tindakan penggunaan simbol dalam rangka mendeklarasikan diri “inilah kami”, “kami” yang dimaknai disini adalah pihak partai yaitu sebagai bentuk penerjemahan arah gerakan ketua partai dan pengurus /kader partai sekaligus ideologi dari lembaga itu sendiri. Pemaknaan pada perempuan sebagai simbol adalah makna subjektif yang diciptakan partai dan diyakini benar melalui proses interaksi yang berkelanjutan dan dikorelasikan sebagai dasar mereka bertindak. Aktualisasi dan artikulasi kebijakan yang diambil partai yaitu ketua partai sebagai pemegang kendali dan pengurus partai atau kader sebagai pelaksana adalah bentuk aktualisasi dan artikulasi diri yang menyesuaikan kehendak publik sebagai tindakan kolektif karena masyarakat pun mendukung dan partai juga menjadikan itu dasar membangun regulasi. Perumusan dan implementasi regulasi berdasarkan konstruksi gender di masyarakat. Meskipun secara fakta, mendefinisikan negatif dan mendiskreditkan kemampuan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak penting adalah sikap yang tidak berprespektif pada pengarusutamaan gender, namun ketika kebijakan partai yang tidak pro gender ini tetap dijalankan mereka meyakini bahwa memang seharusnya perempuan dipandang sebagai pelengkap laki-laki dan keberadaanya tidak akan memunculkan ancaman pada status quo bagi laki-laki serta diyakini bahwa posisi perempuan hanya perlu ditempatkan di bidang-bidang yang tidak jauh dari aktivitas perempuan, sehingga tupoksi yang diberikan partai kepada perempuan terbatas pada bidang tertentu. Apalagi partai juga menggunakan dasar islam fundamental sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Partai lebih eksklusif dan sedikit radikal dibanding partai islam lain, maka penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist semakin menguatkan ruang gerak yang sempit bagi perempuan untuk terjun ke politik.

Interaksi simbolik menempatkan para elit dengan segala failitas unggulan yang dimiliki sebagai pencipta makna atau simbol. Elit ini adalah Ketua Partai yang posisinya menguasai segala aspek kebijakan, sehingga mampu mengontrol pihak lain yaitu pengurus partai atau kader dan juga calon legislatif perempuan dengan strategi dominasi yang cukup kuat dan pantang dilanggar. Upaya mengendorse perempuan eks-partai misalnya, sebagai contoh tindakan pragmatis untuk pemenuhan 30% *affirmative action*, yang dimaknai sebagai perintah wajib, meskipun dapat diartikan bahwa ini adalah sikap partai yang tidak sepenuh hati membangun kader perempuan berkualitas karena dianggap tidak cukup mampu. Kader-kader yang bergabung dengan partai kebanyakan memang ibu-ibu rumah tangga yang tidak seberapa banyak memiliki modal sosial, politik, dan finansial. Perempuan-perempuan ini tidak punya *bargaining position*, seperti *statement* “pokoknya saya diangkut”akhirnya partai pun melihat pribadi perempuan dengan harga tawar yang rendah. Masalah ini harusnya menjadi pekerjaan rumah bagi partai karena mereka gagal melakukan upaya kaderisasi dan pendidikan politik. Alih-alih memiliki andil besar sebagai mesin partai, kekuatan utama tetap dipegang laki-laki yang secara dominan lebih pantas memegang jabatan startegis dan menggerakkan motor kepartaian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya dalam memaknai calon legislatif perempuan adalah dengan menempatkan diri menggunakan dua ideologi sekaligus yaitu islam fundamental dan berorientasi pada politik praktis, yang secara tidak langsung berpengaruh pada setiap pengambilan keputusan partai. Berbagai fatsun-fatsun politik pun digunakan sebagai arah gerakan PKS di masyarakat, begitu juga dengan pencapaian kebutuhan politik yang rasional dengan upaya rekayasa sosial politik bagi calon legislatif perempuan, sehingga tindakan-tindakan pragmatis masih nampak dalam perjalanan partai. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh partai dalam menerapkan kebijakan internal juga belum sepenuhnya mewadahi ruang bagi perempuan (belum pro gender) baik dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kesempatan perempuan bergabung ke politik tidak nampak sebagai prioritas melainkan cukup sebatas pelengkap syarat administrasi pemilu, perempuan tidak banyak mendapat dukungan, posisi tawar yang rendah hingga minimnya regulasi yang tidak pro gender, pengarusutamaan gender belum sepenuhnya teraktualisasi. Skeptisme terhadap kemampuan perempuan akhirnya tetap

menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi perempuan untuk terjun ke politik. Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya masih setengah hati melihat urgensi atau keterbacaan calon legislatif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2001. *Gender Analysis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan pembangunan*. Jakarta : Bappenas.
- BPHN. 2007. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Option Protocol terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*. Puslitbang Departemen Hukum dan HAM. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Charon, Joel M. 1979. *Symbolic Interactionism*. United States of America: Prentice Hall Inc.
- Detik. 2013. *Ini Syarat Untuk Bisa Jadi Caleg PKS*. (online) (www.detiknews.com) diakses 20 Desember 2018.
- DTEI. 2018. *Gender*. (online) (www.downtoearth-Indonesia.org) diakses 8 Oktober 2018.
- Haryati, Eri. 2017. *Partisipasi Politik Perempuan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara*. Volume 6 Nomor 4. Universitas Diponegoro.Semarang.
- Hendrarti, Budi W.D. 2017. *Perempuan dalam Konteks Politik : Representasi Deskriptif Perempuan Pada Pileg 2014 dan pilkada 2015*. Volume 22 Nomor 1 ISSN: 0854-6029. Jurnal Ilmu Politik. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga. Surabaya.
- KPU. 2004. *Daftar Calon Legislatif Tetap 2004-2009*. Surabaya : KPU Kota Surabaya.
- KPU. 2009. *Daftar Calon Legislatif Tetap 2009-2014*. Surabaya : KPU Kota Surabaya.
- KPU. 2014. *Daftar Calon Legislatif Tetap 2014-2019*. Surabaya : KPU Kota Surabaya
- Musdawati. 2018. *Kekerasan Simbolik dan Pengalaman Perempuan Berpolitik di Aceh*. Volume 2 Nomor 2 ISSN 2541-4682. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Aceh.
- Rasyidin, & Aruni, Fidhia. 2016. *Gender dan Politik (Keterwakilan Perempuan dalam Politik)*. ISBN 9786021373736. Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Sugiarto, Toto. 2018. *PKS : Partai Kader Berorientasi Massa*. (online) (kumparan.com) edisi 7 Mei 2018 diakses pada 24 Oktober 2018.
- Supadiyanto. 2015. *Representasi Wanita dalam Politik di Indonesia : Pendekatan konstruksionisme Kritis*. Volume 7 Nomor 1 ISBN 978-602-1054-01-7. Jurnal An-Nida. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara. Jepara.
- Suryadi, 2015. *Partisipasi Politik Perempuan Indonesia Dalam Relasi Gender*. Jurnal Orasi. Volume 6 Nomor 6. Jurusan Pengembangan Masyarakat islam. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. Cirebon.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta : Gramedia.
- Wahid, Umaimah. 2013. *Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilu 2012*. Volume 29 Nomor 1 ISSN 0128-1496. Jurnal Komunikasi , Malaysian Journal of Communication. Universitas Budi Luhur. Jakarta.

LAMPIRAN I DATA HASIL WAWANCARA

NO	PERNYATAAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN SUBJEK DAN INFORMAN
1	<p data-bbox="256 398 475 427">FAKTOR AKSES</p> <p data-bbox="256 465 869 1272">Perempuan masuk ke ranah politik tidak semudah yang di bayangkan, karena banyak problematika yang muncul menjadi kendala cukup berarti. Stereotip publik hingga organisasi yang menanggung. Perempuan masih banyak dianggap sebagai pemanis regulasi, affirmative action 30% bagi partai tidak terkecuali bagi PKS berdasarkan data keterpilihan yang kecil, belum mampu mewujudkan sepenuhnya keinginan publik terkhusus kaum perempuan. PKS juga identik sebagai partai kader, namun banyak kader militan yang justru tidak berbuah maksimal di pemilu. Hal ini tentu juga berangkat dari sistem rekrutmen partai dan pertimbangan-pertimbangan yang menempatkan perempuan pada posisi urgensi tertentu, sehingga pemaknaan atas perempuan masih bias karena dianggap belum sepenuhnya mengangkat angka elektabilitas kepartaian yang masih didominasi praktek maskulinitas ataupun dinasti politik lewat lobby politik. Alhasil akses yang diberikan disinyalir tidak sama antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menimbulkan gap. Berikut beberapa poin pertanyaan dalam wawancara mendalam yang dilakukan :</p> <ol data-bbox="256 1305 869 1910" style="list-style-type: none"> 1. Apakah calon legislative perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama untuk bergabung dengan PKS Kota Surabaya? 2. Bagaimana system rekrutmen yang dijalankan oleh PKS Kota Surabaya bagi calon legislative perempuan ? 3. Apa saja bentuk pertimbangan yang dilakukan PKS dalam merekrut calon legislative perempuan ? 4. Apa saja faktor yang memiliki poin tinggi dalam sistem rekrutmen calon legislatif perempuan ? 5. Bagaimana pola penentuan nomor urut calon legislatif perempuan ? 6. Apakah bentuk rekrutmen yang dijalankan PKS mengacu pada ideology Islamic fundamentalis atau politik praktis atau keduanya ? 	<p data-bbox="898 409 1404 517">SUBYEK : Achmad Suyanto, Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya</p> <p data-bbox="898 551 1455 1659">Ya..kita kasih akses yang sama lah sama semua orang baik itu perempuan atau laki-laki. PKS identiknya sebagai partai kader tapi faktanya gak juga, hitunganya kader itu adalah setiap orang yang sudah pegang KTA PKS kan sudah kader. Yaa..artinya setelah dia menerima sekian banyak fatsun politik, sopan santun politik di PKS itu dan sekian banyak pola pendekatan yang dilakukan PKS dia terima ya oke. Tapi tentu basis sosial dilihat. Publik juga akan melihat <i>white ring</i>, rentang panjang dari keterkenalan perempuan di publik. Bukan pertimbangan utama, karena PKS kan terbiasa bukan figur. Kita bisa <i>mengendorse</i> orang dengan rekayasa sosial politik. Kita juga ada pertimbangan-pertimbangan, jam terbang itu bagi mereka yang mau mencalonkan ada nilainya, basis sosial harus tinggi. Diliha rekam jejaknya, berdasar itu kita lakukan <i>scoring</i> berapa nilainya, kita tentukan terkait siapa dia. Lanjut ke penentuan nomor itu juga dari rangking uji kompetensi PKS, yang bersangkutan <i>well known</i> atau tidak. Jadi penomoran itu berdasarkan <i>track recordnya</i>, penomoran juga kita sesuaikan dengan hasil nilai kriteria-kriteri itu, kalau rekam jejaknya gak bagus ya gak mungkin dapat nomor atas, tapi banyak kok dari PKS kita yang dapat nomor atas untuk perempuan-perempuan caleg. Tapi, tahun ini juga ada beberapa artis yang ikut nyaleg lewat PKS, ya kita tetap <i>check</i> rekam jejaknya.”</p> <p data-bbox="898 1704 1361 1812">Reni Astuti, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS dan Pengurus Partai</p> <p data-bbox="898 1856 1455 2004">“Di PKS itu rekrutmennya ada pemilihan internal juga, kader menyampaikan usulan nama-nama. Dari nama-nama yang muncul itu digodok di struktur, selanjutnya struktur</p>

memilih di antara mereka mana yang berpotensi dan mana yang tidak, untuk proses pencalegan. Nah jika secara angka kuantitas perempuan mungkin kita melihat masih sebagai pendukung kalau dilihat dari jumlah ya. Secara umum masih didominasi laki-laki, tapi sekarang penomoran dari PKS juga sudah sesuai, banyak nomor 1 diisi caleg perempuan. Yang perlu dipahami publik juga pendaftaran di kita itu nol, foto saja kita fotokan biar kelihatan bagus. Proses pencalegan di PKS kita lihat dari 2 hal, modal sosial dan uang. Sekarang tanpa uang juga tidak bisa, tergantung bagaimana perempuan bisa efektif dan efisien mengelola itu. Tanpa Modal sosial, butuh modal dana yg besar, tapi kalau modal sosialnya sudah kuat, itu bisa terbantu. Kinerja dewan itu membentuk modal sosial, itulah kenapa incumbent banyak yg jadi lagi. Karena dari segi modal dananya juga lebih siap. Untuk rekrutmen kita juga tetap mengacu pada fatsun-fatsun PKS karena kita dasarnya sudah menjadi partai islam.”

INFORMAN

Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender UNAIR

“Sistem rekrutemen partai punya pengaruh besar. Rekrutmen dari proses nominasi, tahapan internal partai, pendaftaran ini saya memperhatikan betul, misalnya bulan Agustus saya mencoba melihat di bulan Maret, April, parahnya mereka belum apa-apa, belum tau siapa yang mau diusung, perempuan mana, belum ada. Baru sebulan dua bulan mereka asal-asalan memasukkan, alhasil partai tanpa kader, ia minim kader terutama perempuan. Maka jangan heran kalau yang tidak punya *basic* politik tapi punya basis sosial tinggi bisa lolos seleksi partai, karena memang tidak banyak upaya optimal untuk membangun calon legislatif dari kader-kader yang berkualitas dan siap pakai. Perempuan secara aktual harus mampu

		<p>mengekspresikan keinginan, dorongan dan kontemplasinya untuk running dalam pemilu. Oleh sebab itu ambisi dan modal yang dimiliki perempuan caleg sedemikian mungkin dimanfaatkan sebagai peluang untuk meyakinkan tim <i>gatekeepers</i> yang mayoritas adalah laki-laki.</p> <p>Partai sekarang itu juga berhitung, ketika data survey menunjukkan 51% pemilih adalah perempuan dan itulah yg jadi sasaran tembak, kalau dia tidak menempatkan perempuan di nomor-nomor yang tidak cantik, dia akan kalah. Saya mencoba memetakan bahwa hasil <i>research</i> saya juga menunjukkan nomor 1-3 sudah mulai menempatkan perempuan, karena secara real memang kursi partai biasanya hanya ada di 123 saja, nomor-nomor ini yang lebih banyak dilirik masyarakat, dan peluangnya lebih besar, tingkat keterpilihannya tinggi, dan mestinya kondisi ini ditangkap oleh partai, perhitungannya ada pada suara terbanyak. Ada orang bilang, nomor tidak menjamin, tapi bagi saya itu menjamin karena psikologi pemilihnya. Tapi jangan salah di dalamnya ada lobbying, ada pertarungan ketat disana.</p> <p>PKS sebenarnya sudah sesuai untuk pemenuhan 30% bagi keterpenuhan calon legislatif perempuan, tetapi memang keterwakilannya rendah. Kalau bicara kuota 30%, perempuan menurut saya masih jadi pemanis saja. Mereka berjuang mencari pundi-pundi suara dengan minimnya basis sosial yang dimiliki tanpa banyak dukungan dari partai. Secara modal sosial, perempuan itu masih lebih rendah dari laki-laki, kecuali mereka jadi pimpinanan perkumpulan <i>fattayat</i>, <i>aisyah</i> dll itu bisa menggerakkan tingkatan basis masa bagi caleg perempuan PKS tetapi kalau dia tidak dalam posisi demikian akan sangat sulit. Sementara kalau bicara modal sosial sebagai dasar partai politik akan meloloskan dalam tahap seleksi, ya kita lihat dulu, bukan salah perempuan kalau basis sosialnya rendah, karena selama ini perempuan banyak yang tidak punya waktu ke</p>
--	--	---

		<p>arah itu, energi dan uang tidak tercurah kesana, karena <i>triple burdernya</i> perempuan ya ,...jadi peran-peran tradisionalnya perempuan jadi lebih utama, ia memikirkan politik ya setelah dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domestik. Suara PKS terbatas karena mereka masih terkungkung ideologinya, sehingga sedikit susah mencari suara suara yang nasionalis. PKS masih dianggap islamnya fundamentalis, bahkan ada yang bilang agak radikal, ini yang berebut dengan partai yang lebih moderat seperti PKB, PPP, sehingga islam moderat akan diambil oleh PKB atau PPP atau partai nasionalis lain, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. PKS ini stigmanya eksklusif jadi pemilihnya terbatas, lebih banyak pemilih dari area kampus daripada penduduk desa/kampung Maka perlu ada evaluasi ditubuh partai, ada yang perlu diubah..”</p> <p>Pinky Saptandaru, Dosen Antropologi Gender UNAIR dan Mantan Staff Ahli KemenPPPA</p> <p>“Ini seperti siklus yang berulang, mulai dari pertama kali 2004 sampai kemudian tahun 2009, kita mulai lagi 2014 dan sekarang tahun 2019, jadi hanya ada pengulangan saja pada satu proses di mana tidak ada satu hal kabar gembira kecuali dari sisi regulasinya saja. Partai dan caleg, kesiapan individu ataupun kelembagaan partai tidak cukup sungguh-sungguh, tidak cukup besar karena ketika mereka sungguh-sungguhpun mudah tidak ?kan gak mudah. Ketika mereka bekerja keras mudah gak ?enggak. Karena apa ?iklim politik kita sudah <i>kadung</i> kayak gini, <i>kadung</i> diwarnai politik uang, fitnah, <i>jegal-menjegal</i>, jadi dengan kondisi yang normal saja mereka perjuangannya berat, apalagi dengan ketidaksiapan dari pihak partai untuk betul-betul mendorong keterwakilan perempuan bisa terpenuhi. Di tambah dengan PKS Surabaya yang saya dengar juga mengusung tokoh publik seperti selebriti tentu akan lebih</p>
--	--	---

		<p><i>njlimet</i> lagi pertaruhan nya. Banyak yang gak yakin, gak siap karena modal nya kecil. Kenapa saya berani mengatakan tidak siap ? karena kalau semisal sudah siap niat nya 2019 ikut pemilihan ya siap nya harus dari tahun 2014, sekolah nya harus 5 tahun, gak ada sekolah 3 bulan untuk masuk ke politik, itu bercanda namanya. Jadi kalau diproyeksikan 2024, ya sekarang sekolah nya. Usaha yang harus dilakukan untuk mendidik perempuan jadi calon-calon yang berkualitas ya...adalah entah dibuat sekolah perempuan politik, sekolah kader, entah apapun tapi betul-betul ada satu proses, suruh magang, ikut membantu yang sudah jadi. Perempuan-perempuan ini bisa belajar. Duduk, dengar, menyerap itu sudah sekolah. Lika likunya ke masyarakat harus seperti apa, harus paham. Coba kalau kita perhatikan betapa mereka <i>jor-joran</i> pasang baliho, yang menurut saya gak ada efektivitas nya. Partai manapun entah itu PKS juga sama, apalagi mereka punya ideologi islam yang masih kental, itu berpengaruh lho bagi keputusan-keputusan politik mereka, basis nya kecil dan sekarang banyak partai yang lebih tertarik ke partai nasionalis.“</p> <p>Nurul Amalia, Divisi Teknis KPU Kota Surabaya</p> <p>“Setiap partai politik punya sistem rekrutmen dan pertimbangannya masing-masing, namun memang kalau bicara akses bagi perempuan saya rasa memang semua partai tidak terkecuali PKS juga nampaknya masih menjadikan affirmative action itu bagi perempuan ya..hanya bekal untuk bisa ikut pemilu. Jadi akses yang diberikan untuk tingkat partisipasi bahkan hingga manfaat pun saya rasa pasti beda, untuk penomoran memang ada yang di nomor atas tapi gak banyak. Partai islam seperti PKS juga saya rasa masih menggunakan keislamannya untuk menjalankan sistem perpolitikan di internal partai meskipun saya pikir sudah sedikit</p>
--	--	--

		bergeser ke politik praktis yang lebih moderat”
2	<p>FAKTOR PARTISIPASI</p> <p>Berdasarkan data KPU Kota Surabaya, Partai Keadilan Sejahtera dalam lingkup DPRD Kota, menempatkan calon legislatif perempuan untuk periode tiga kali pemilihan legislatif, rinciannya periode 2004-2009 sebanyak 14 caleg perempuan dan 33 caleg laki-laki, 2009-2014 17 caleg perempuan dan 33 caleg laki-laki, dan 2014-2019 18 caleg perempuan dan 37 caleg laki-laki. Namun, komposisi legislatif perempuan di DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS berdasarkan pemilihan umum 2009-2014 dan 2014-2019 adalah laki-laki 14 orang dan perempuan 1 orang. Sementara itu, untuk partai besar lainnya seperti PDIP periode 2009-2014 adalah laki-laki 6 orang dan perempuan 2 orang, periode 2014-2019 laki-laki 10 orang dan perempuan 5 orang, Golkar periode 2009-2014 laki-laki 5 orang dan perempuan 0, periode 2014-2019 laki-laki 1 orang dan perempuan 3 orang, dan Demokrat periode 2009-2014 laki-laki 9 orang dan perempuan 7 orang, periode 2014-2019 laki-laki 2 orang dan perempuan 4 orang.</p> <p>PKS Kota Surabaya masih kalah saing dengan partai lain meskipun PKS termasuk partai yang sudah lama berkecimpung dalam sistem demokrasi Indonesia. Salah satu hal yang perlu disoroti dalam hal ini adalah tanggungjawab partai dalam mengenalkan caleg perempuan kepada publik, jika upaya pengenalan cenderung pasif, caleg hanya akan punya basis sosial kecil alhasil keterwakilan juga kecil, begitu juga sebaliknya, namun banyak caleg-caleg perempuan yang mengaku partai cenderung lepas tangan, mereka bergerak sendiri mencari massa/basis sosial secara pribadi. Sehingga banyak pengamat juga menyebutkan partai masih memberikan pandangan atau pemaknaan bagi perempuan tidak lebih sebatas diskursus atau wacana politik yang belum terwujud optimal. Lantas menimbulkan pertanyaan tentang seberapa penting keberadaan caleg perempuan bagi PKS jika tidak didorong dengan upaya lebih untuk menghadapi perspektif publik yang beragam ditambah juga dengan modal politik yang kurang.</p> <p>Berikut beberapa poin pertanyaan dalam</p>	<p>SUBYEK : Achmad Suyanto, Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya</p> <p>“PKS Kota Surabaya tidak luput dalam upaya pengenalan caleg perempuan di mata publik untuk menopang basis sosialnya, dengan upaya mengajak caleg-caleg perempuan PKS bergabung bersama publik pada acara-acara tertentu, sebagai tokoh yang di dorong dihadapan anggota PKS lainnya yang memang sudah punya jam terbang tinggi. Kegiatan ini juga di medikan artinya kita mengundang insan pers untuk ikut meliput jalannya acara. Melalui cara ini lah rating caleg ini bisa naik, sehingga mereka bisa memiliki basis sosial atau menambah basis sosial yang sebelumnya sudah mereka kantongi masing-masing. Akses partisipasi yang kami kasih sama. Bahkan menurut saya ruang ruang media PKS banyak diisi oleh caleg-caleg perempuan. Kita memandang sama dan memberi akses sama. Akses itu ditunjukkan dengan unit partai terkecil yang itu di <i>endorse</i> oleh ibu ibu yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK), isinya pengajian ibu-ibu, dan program-program sosialita. Program PKS secara umum sama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. PKS <i>welcome</i> kepada ibu-ibu. Kalau bagi caleg perempuan, dia punya massa oke, dia bisa berkembang dengan massa itu. Kerja keras dari partai untuk menokohkan. Ini yang mungkin berbeda dengan partai lain. Kalau kita menghambat gak ada ceritanya lah, semua yang masuk baik baru atau sudah lama semua berjalan sama tidak ada kartu merah”.</p> <p>Reni Astuti, Anggota DPRD Kota</p>

<p>wawancara mendalam yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana PKS Kota Surabaya memaknai upaya perempuan untuk bergabung dalam pemilihan legislatif ? 2. Bagaimana peluang politik bagi perempuan untuk menjadi calon legislatif ? 3. Bagaimana upaya PKS Kota Surabaya untuk meningkatkan partisipasi calon legislatif perempuan ? 4. Apakah calon legislative perempuan dan laki-laki mendapatkan porsi partisipasi yang sama selama mengikuti kegiatan PKS Kota Surabaya ? 5. Bagaimana upaya PKS Kota Surabaya dalam memberikan ruang partisipasi bagi calon legislatif perempuan di kegiatan partai dan pengenalan public ? 6. Bagaimana pandangan PKS Kota Surabaya terhadap superioritas dalam menj: xv kepentingan politik ? 7. Bagaimana upaya PKS Kota Surabaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada calon legislatif perempuan dan laki-laki agar tidak bertabrakan dengan ideologi islam yang menganggap perempuan cukup sebagai makmum ? 	<p>Surabaya dari Fraksi PKS dan Pengurus Partai</p> <p>“Dengan masuknya perempuan di parlemen atau struktur partai, sama. Gak ada pembeda laki-laki dan perempuan. perempuan tidak dibatasi, tapi substansi apa yang bisa diberikan tanpa melihat jenis kelamin. Ke depan akan berkembang, PKS tidak hanya di pencalegan tapi berlanjut ke tingkat dewan. Karena kita menyadari ada kebutuhan masyarakat yang perlu ditangani politisi perempuan. Kita paham juga perempuan itu berbeda struktur biologis, hingga cara berpikirnya dengan laki-laki, saya merasakan itu ketika PKS mengusung kebijakan perundang-undangan dan aturan lainnya. Jadi kuota 30% perempuan di parlemen saya yakin akan semakin memperkuat posis perempuan. karena publik juga tetap butuh peran perempuan untuk menyuaran aspirasinya. Kalau dilihat dari segi partisipasi perempuan, PKS menempatkan perempaun sesuai dengan potensi yang dimiliki, ini kalau dikepengurusan, artinya tidak selalu dibatasi posisi perempuan itu. Begitu juga di kenggotaan dewannya. Selagi perempuan mampu berkontribusi pada bangsa negara, PKS memberi ruang atau kesempatan lebar. Suara PKS secara umum memang belum besar, kita masih berjuang. Secara proporsi antara jumlah anggota dewan dengan yg lain masih kalah. Kita tidak bisa memungkirkan bahwa siapa yang dananya besar atau modalnya besar itu peluangnya besar. <i>Wani Piro</i> masih ada. Tapi sebenarnya harapannya publik sudah pintar, memilih berdaulat rakyat pintar seperti slogannya KPU.”</p> <p>INFORMAN Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender UNAIR</p> <p>“Peluang politik bagi perempuan rendah. Perempuan sebenarnya terbuka tapi peluang</p>
--	---

		<p>masih kecil itu tadi.. Beda dengan laki-laki. Caleg tanpa didukung partai itu ada, ketika jadi caleg ya itu urusan pribadi menang atau kalah urus sendiri, mereka berjuang sendiri. Partai hanya perahu atau kendaraannya. Partai butuh perempuan karena terbentur regulasi, tapi..setelah itu mereka dibiarkan sendiri, istilahnya ya kader tanpa dukungan politi. Kalau sudah begini ya partai masih setengah hati, supporting untuk regulasi saja, dukunganya belum full, kalau full ya di didik betul jadi kader. <i>Electoral threesold</i> bisa jadi gak terwujud bagi PKS kalau mereka tidak mengubah sistem kepartaiannya. PKS itu termasuk partai yang jarang mengangkut orang dari PKS sendiri, padahal ada kader PKS yang bagus tapi tidak diusung. Sebab, pundi-pundi duit gak ada, orang luar yang masuk kaya, maharnya ada, kalau dari kader kan tidak ada mahar politiknya. Apalagi kalau bicara kesetaraan gender banyak yang kurang paham, pendidikan politiknya kurang. Banyak perempuan tidak mengerti gender awareness, pokoknya saya diangkut partai karena saya perempuan, representasinya lebih kepada deskriptif atau simboliknya, saya perempuan saya nanti harapannya dipilih oleh perempuan kan gitu..itu aja, tapi jarang mereka memahami apa yang harus disampaikan, visi misi programnya juga tidak menyentuh pada gender sensitivitas. Apalagi PKS sebagai partai islam dengan memainkan politik praktisnya juga tidak menjamin ada penyetaraan gender dalam memaknai perempuan, yang penting laki-laki atau perempuan terisi sesbagai syarat pemilu. Ketika partai berusaha menegakkan kesetaraan gender tapi tidak didukung dengan upaya penyadaran gender bagi caleg-calegnya maka apakah itu sudah menjamin partai sudah benar-benar pro gender juga ?belum tentu.Perempuan itu identik dengan pelit, perhitungan, itu membuat banyak pihak yang berurusan dengan tim sukses lebih milih laki-laki karena gak banyak mikir. Strategi lain ya perempuan harus mendukung perempuan,</p>
--	--	---

		<p>saling jadi tim sukses masing masing dari yang sudah punya modal sosial. Perempuan itu sebenarnya juga ada budaya bisu, manutan, bargaining positionnya masih lemah, itu tantangan bahkan juga hambatan, tapi yang pasti perempuan harus bisa kuat dalam berpolitik, harus pintar, agar tidak jadi pelengkap penderitaan”.</p> <p>Pinky Saptandaru, Dosen Antropologi Gender UNAIR dan Mantan Staff Ahli KemenPPPA</p> <p>“Beberapa kali saya ngisi materi buat partai, semua sepakat bahwa kondisinya seperti itu, lalu cara promosi yang salah juga. Habis uang banyak untuk hal yang gak penting, misal baliho besar, apa dia layak dipilih, programnya apa, paling masyarakat hanya lihat “ohhh..dia nnyaleg ya”. Satu-satunya cara ya turun di dapil. Gak semua partai <i>ngopeni</i> calegnya. Nyarinya buat caleg aja <i>last minute</i>. Belum berpikir 30 % jadi tapi 30% utk didaftarkan saja. Itu bahaya, kemungkinan menang ya kecil. Ketika politik uang gila-gilaan, makin terpinggirkanlah kepentingan perempuan. yang potensial adalah yg pengalaman. Itu tidak ada satu sistem A belajar dari B atau sebaliknya. Ada nafsu berkuasa. Partai tanpa islam saja patriarkinya kuat ditambah Islam ya tambah lagi, pasti ada dalil-dalil atau penanaman pada perempuan-perempuan untuk ngalah, mengutamakan laki-laki walaupun pada saat bersamaan laki-laki ini sebetulnya gak oke oke banget, tapi karena dia laki-laki akhirnya diutamakan oleh partai dan masyarakat. Publik ini kan juga sudah terbentuk cara berpikirnya juga patriarki dominan. Orang dipilih karena popularitas, artis banyak yg muncul, muncullah kemudian partai-partai bertabur artis supaya mudah mendulang suara kenapa ?ya karena terkenal, tapi apakah terkenal itu artinya dia capable ? belum tentu. Tapi partainya gak mau susah payah, cari yg sudah punya massa, tingkat keterpilihannya</p>
--	--	--

		<p>pasti besar, dan itu dianggap sebuah keuntungan. Tapi nanti dia duduk di DPRD mau ngapain ya gak dipikirkan. Secara kuantitas belum tercapai, secara kualitas juga demikian ,makin sulit. Jadi kuantitas saja gak terpenuhi, kualitasnya juga susah. Karena yg duduk di kursi dewan terbatas, cara dia memperjuangkan kursi-kursi gender juga sangat sulit selain karena kapasitasnya dia yag terbatas. Bisa belajar kalau mau belajar, tapi berapa banyak yang mau belajar ?akhirnya nganddelin staff ahlinya staff khususnya dan kadang-kadang saya berpikir “ya mendingan staffnya yang jadi daripada sebaliknya. Laki-laki juga blm tentu berkualitas, dua-duanya juga perlu dipertanyakan tetapi tingkat kemudahannya kan lebih baik laki-laki. Ideologi partai itu masih bias gender, artinya walaupun di dorong ada caleg perempuan, mereka pastinya sudah tahu juga peluang mereka untuk menang juga gak begitu besar karena dilihat track recordnya. Partai yang tidak pakai mahar saja kesulitan apalagi yang pakai mahar”</p> <p>Nurul Amalia, Divisi Teknis KPU Kota Surabaya</p> <p>“Saya sebagai perempuan juga sadar kok bahwa <i>affirmative action</i> tidak terus memaksa harus 30%, walaupun tidak mampu ya sudah, gak apa apa. Tetapi dalam proses itu kasihlah peluang perempuan itu untuk bersaing lebih dari yang lain. Tapi juga banyak anggapan kalau perempuan dikasih peluang lebih saja belum bisa menyaingi laki-laki apalagi dikasih beban lebih. Konkritnya pandangan masyarakat dan sesama politisi atas keberadaan <i>affirmative action</i> bagi perempuan, menurut saya juga masyarakat saat ini kurang menghargai <i>affirmative</i> itu, tidak terkecuali ya partai politik. Buktinya kalau sama-sama pinter atau sama sama punya partisipasi sama selalu laki-laki berpendapat “cukup perempuan 30% saja”, loh kok gt ?mestinya kan enggak, kalau</p>
--	--	---

		<p>kompetisi biasa, gak harus perempuan dibatasi 30%, ya sudah biarkan mengalir di kondisi apapun, misalnya di kepengurusan, rekrutmen tenaga PPK/PPS, it tidak perlu dibatasi 30%. Tapi kasih ruang yang sama dan metode sama. Tapi yang perlu dipikir lagi adalah ketika jumlah perempuan itu minim, maka dia dikasih keringanan lebih daripada laki-laki harusnya begitu. Jadi kesadaran terkait gender perlu ditumbuhkan agar kesempatan perempuan bersaing di politik lebih besar. Tidak hanya bagi kaum perempuan saja tapi laki-laki juga. Kalau laki-laki yang menyuarakan ada perhatian lebih, kalau perempuan sudah biasa. Dan kalau dilihat dari konteks ruang-ruang publik jumlah perempuan memang tidak bisa banyak, ini tentu juga pengaruh stereotip dari publik kepada perempuan bagi mereka yang menggunakan dalil-dalil atau hadist dalam Al-Qur'an tak terkecuali partai Islam yang mungkin juga diterapkan bagi PKS. Seringkali perempuan punya keterbatasan, rapat tengah malam, budaya masyarakat belum bisa kalau menerima perempuan itu pulang malam padahal pulang malam itu bukan berarti kluayuran misalnya harus ke masyarakat, sosialisasi, jaring aspirai jadi waktu banyak dihabiskan di lapangan, nah publik masih banyak yang beranggapan kalau perempuan pulang malam itu gak baik. Akhirnya orang membatasi diri. Saya juga belum melihat secara terang-terangan atau jelas ada partai berkampanye terkait gender. Apapun, islam ataupun nasionalis, tidak terkecuali PKS. Partai belum ada yg serius menyetarakan gender, jadi dibiarkan berjalan begitu saja".</p>
3	<p>FAKTOR KONTROL</p> <p>PKS Kota Surabaya berdiri pada dua sisi, yaitu islam sebagai ideologinya namun berjalan pada politik praktis, orientasinya adalah pada</p>	<p>SUBYEK : Achmad Suyanto, Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya</p> <p>"Kalau masyarakat bilang PKS gak pro</p>

<p>kemenangan di pemilihan umum. Jika mengacu pada dua pandangan ini, maka bagaimana PKS bisa menjalankan fungsinya dengan benar karena sudah mencampurkan islam dan politik sebagai ideologi partai. Apakah cara pikir mengenai makna perempuan di politik juga masih membawa kultur islam yang sangat kental bahwa perempuan cukup sebagai makmum dan kedudukan di politik bukan sesuatu yang mewajibkannya, karena politik masih ranahnya kaum laki-laki.</p> <p>Banyak kalangan yang beranggapan PKS tidak pro gender, karena posisinya yang eksklusif sehingga banyak dipandang menjadikan dasar dalil atau al-hadist sebagai dasar memaknai perempuan, sehingga kontrol perempuan dalam bergabung di ranah publik tidak leluasa. Pembangunan berbasis gender belum optimal karena kesadaran partai belum maksimal. Tidak banyak calon legislatif yang menyuarakan pentingnya gender dalam masa kampanye atau ketika telah terpilih menjadi anggota dewan. Kondisi ini seakan mempersempit ruang gerak perempuan untuk masuk ke berbagai sektor pembangunan, selain tidak adanya dukungan penuh dari masyarakat, partai pengusung juga lebih banyak mengandalkan caleg untuk unjuk diri dengan usaha sendiri, sehingga apabila calon legislatif yang telah memiliki modal sosial politiknya bagus, mereka dapat dengan mudah menggaet massa, serta sebaliknya, dan posisi ini harus disandingkan dengan kekuatan caleg laki-laki yang dianggap memiliki porsi lebih di mata publik. Alhasil ketika harga tawar perempuan lemah, ruang kontrol mereka juga kecil.</p> <p>Berikut beberapa poin pertanyaan dalam wawancara mendalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk kebijakan responsive gender yang dilakukan oleh PKS Kota Surabaya bagi calon legislative perempuan ? 2. Apakah calon legislative perempuan dan laki-laki memiliki porsi atau ruang penguasaan yang sama dari berbagai aspek ? 3. Apakah calon legislatif perempuan dan laki-laki mendapatkan pendampingan pengenalan publik yang sama ? 4. Apakah calon legislatif perempuan diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam upaya pengenalan publik ? 5. Apakah calon legislatif perempuan bertindak sesuai prinsip partai ? 6. Bagaimana PKS Kota Surabaya menjalankan fungsi kontrolnya sebagai partai dakwah ? 	<p>perempuan, lha wong yang jadi anggota DPRD juga ada yang perempuan, ya gak mungkin lah kalau kita gak pro gender. Bisa dilihat dari faktor aksesnya kita kasih ruang penomoran juga paling atas kebanyakan perempuan. Ruang media kami juga banyak diisi oleh caleg-caleg perempuan. Nah, kalau dari segi penguatan karakter, PKS itu adalah partai yang pro family, pro pada pembangunan keluarga. Kita juga pro gender. Unit terkecil dari masyarakat yang menurut saya ini desain lingkungan yang paling stabil dan andalan masyarakat, oleh karena itu kalau tidak ada perempuan rasanya kok tidak lengkap. Karena PKS itu punya tagline “Keluarga Sakinah” ada suami, istri dan anak. Kalau tidak ada yang mengetahui unsur domestik dan peran peran pentingnya perempuan sebagai soko guru bagi generasi masa depan terasa tidak lengkap. PKS itu juga punya program andalan namanya Program Keluarga Harapan, sampai sekarang dipakai oleh Kementerian. Karena sub terkecil dalam program itu adalah ibu dan anak. Supaya perempuan juga punya kontrol sama dengan wilayah garap laki-laki, ya wilayah garap perempuan kita kasih ruang luar biasa biar mereka bisa mengeksplor semaksimal mungkin, ya itu biar adil”.</p> <p>Reni Astuti, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS dan Pengurus Partai</p> <p>“Saya dengan teman-teman di partai punya prinsip yang sama, begitupun calon legislatif yang ingin bergabung dengan kami ya harus sesuai dengan pandangan politik kami. PKS sebagai partai dakwah punya perhatian besar pada ketahanan keluarga, di realisasinya PKS ada bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Artinya, bahwa perempuan perempuan PKS ketika berkiprah di politik atau masyarakat itu sebagai ajang ia melakukan peran perluasan dia sebagai perempuan. Sementara ada peran asasi yang</p>
--	---

		<p>harus tetap dijalankan perempuan sebagai istri dan ibu. Dia tetap bisa menjalankan peran politisnya yang manfaatnya tidak hanya bagi keluarga tapi juga sekitarnya. Kita juga ikut mendampingi teman-teman caleg yang ingin menawarkan program pembangunan ke masyarakat, jadi kita tidak <i>cul-culan</i>“</p> <hr/> <p>INFORMAN Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender UNAIR</p> <p>“Partai islam seperti halnya PKS Surabaya ini saya rasa memang belum sepenuhnya responsif gender, karena partai yang punya ideolgi islam kemudian terjun ke politik pasti punya pandangan yang berbeda, partai yang bukan berangkat dari islam saja sudah banyak yang tidak responsif gender apalagi ini, maka perlu kiranya perempuan caleg itu diwadahi dengan baik, agar mereka juga bisa memberikan kontribusinya bagi politik itu sendiri. PKS yang notabene juga sebagai partai dakwah harusnya bisa menjalankan dahwahnya secara lebih flexible dan menyentuh banyak masyarakat”</p> <hr/> <p>Pinky Saptandaru, Dosen Antropologi Gender UNAIR dan Mantan Staff Ahli KemenPPPA</p> <p>“Dari segi akses, partisipasi, kontrol, hingga manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki itu berbeda, dominasi masih ada pada laki-laki, yang paling diuntungkan masih laki-laki, partai banyak yang tidak mengakui padahal saya menemukan banyak seperti itu. Penguasaan bidang atau aspek apapun di politik juga masih laki-laki, perempuan bisa tapi gak banyak, mereka tidak punya kuasa lebih, kontrolnya pada pertahanan politik juga lemah, jadi kalau ditanya apakah calon legislatif perempuan dan laki-laki memiliki kontrol yang sama dalam aktivitas politiknya ? jawabannya tidak, apalagi partai islam</p>
--	--	---

		<p>seperti PKS ini yang masih kuat dengan islamnya”</p> <hr/> <p>Nurul Amalia, Divisi Teknis KPU Kota Surabaya</p> <p>“Jumlah perempuan di politik dari Partai islam dan salah satunya PKS, memang jumlahnya minim. Jumlah minim itu karena pertama beban perempuan secara nyata di publik adalah berat, artinya kalau perempuan itu mau berkarir dan dia sudah berumah tangga pasti berpikir ..nanti anakku gimana ? tetapi kalau laki ya sudah berkarir saja, nah ini ada beban mental atau secara fitrah bagi perempuan. Dari beban itulah perlu ada <i>afirmative</i> perempuan dan ini efeknya juga akan lari kepada penguasaan aspek atau bidang yang menjadi bagiannya selama menjadi calon legislatif, selain itu juga cangkupan untuk meraih mangsa juga tidak banyak, lebih ke arah perkumpulan ibu-ibu fatayat atau kampus-kampus sebagai bagian dakwahnya, sehingga hasil pemilu tidak banyak yang memuaskan, apalagi sekarang sudah banyak yang beralih ke pandangan moderat”.</p> <hr/>
4	<p>FAKTOR MANFAAT</p> <p>Dalam lika liku dunia perpolitikan, banyak pelajaran yang harusnya dapat diambil oleh setiap calon legislatif, baik dari cara berorganisasi yang baik selama bergabung dengan partai, praktek lobbaying atau negosiasi politik yang cerdas, yang sudah satu paket dengan pendidikan politik. Naun sejauh ini, realisasinya masih buram karena pendidikan politik dan kesadaran politiknya belum maksimal baik dari caleg ataupun partai pengusung. Posisi perempuan sebenarnya sangat menentukan, perempuan harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan partai dan publik bahwa mereka mampu dan layak. Akan tetapi kondisi ini justru terbalik, banyak caleg perempuan masuk ke politik</p>	<p>SUBYEK : Achmad Suyanto, Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya</p> <p>“Kita memberi sintesa kepada publik, ya tidak harus ikut logika publik bahwasanya PKS itu tetap partai yang menawarkan islam sebagai solusi. Oleh karena itu warna islamnya memang mengental tetapi aktualisasi dan artikulasi kepublik disesuaikan dengan kehenda publik, bukan istilahnya harus mengikuti logikanya PKS, tapi logikanya publik. Kalau logikanya PKS yang doktrinasi, tapi kita ikut publik, mereka yang menentukan apa yang dibutuhkan. Namun</p>

<p>asal-asalan, asal masuk, asal jadi, di dukung partai yang juga berburu 30% keterwakilan perempuan.</p> <p>Pemilu harusnya menjadi wadah tepat bagi perempuan untuk berkontestasi, namun ketidakmunculan perempuan maksimal bahkan secara terang-terangan atau terbuka juga dapat dimakna sebagai bentuk ancaman bagi status quo laki-laki yang memang telah terbiasa mendominasi banyak sektor publik. Namun, yang perlu di ^{xxii} bahwa persepsi atau pandangan akan pent keberadaan perempuan di ranah politik sesungguhnya tergantung dari kebijakan partai politik sendiri, ketika cara berpikir atas pemaknaan sosok perempuan masih mengakar pada budaya patriarki, maka konsep perempuan di tubuh partai akan tetap kelabu, apalagi ketika partai islam seperti PKS Kota Surabaya disinyalir masih memakai tendensi ideologi islam yang kental, menggambarkan posisi perempuan sebatas makmum dan pendukung laki-laki.</p> <p>Bagi mereka yang masih berpandangan pada perempuan adalah subordinat laki-laki, golongan ini mendasarkan pendapatnya pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya <i>“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”</i> Ayat surat tersebut diperkuat dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi <i>“Bagi para wanita, mereka punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang benar. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”</i> Ayat-ayat tersebut sering dikaitkan dalam konteks rumah tangga saja, akan tetapi banyak pula golongan yang memakai dengan logika apabila seorang kepala rumah tangga saja haruslah laki-laki, maka seorang kepala negara juga harus laki-laki.</p> <p>Selain ayat, ada juga hadits Rasulullah SAW terkait dengan posisiperempuan, yang beliau bersabda: <i>Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.”</i> (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i). Dari hadits ini ulama banyak berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperkenankan menduduki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin</p>	<p>perlu digaris bawahi bahwa perempaun di politik itu juga tidak apa apa, sekalipun mereka punya tantangan berpolitik karena harus memposisikan kodratnya sebagai istri/ibu dan bekerja di ranah publik. Memang kadang benar dan kadang tidak benar, jika posisi perempuan itu banyak hambatan, segala sesuatu dilihat konteksnya. Nah kalau Nabi menyebut wanita adalah pimpinan di wilayah garapnya maka kita kasih ruang pada wilayah pimpinanya itu. Well prepare lho ibu-ibu, apakah stereotip ini terus dipertahankan ya tidak juga, kita tidak akan memisahkan itu. Kita mengacu pada kajian dna pustaka jaman dahulu yang membenarkan ada kok jadi tentara jaman nabi, yang menyelamatkan nabi, berarti ibu-ibu boleh perkasa, jadi stereotip apakah perempuan tidak boleh menyentuh ruang-ruang publik ya boleh. Bagi saya boleh. Selama peran dan fungsiya tidak menegasikan hambatan perempuan di politik ya kenapa tidak, kan begitu. Kalau maslahe manfaat yang bisa dinikmati caleg legislatif ya banyak mbak..mereka pasti dapat pendidikan politik, kepemimpinan, dll apalagi kalau sudah terjun di kegiatan partai dan bertemu publik itu akan kelihatan”.</p> <p>Reni Astuti, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS dan Pengurus Partai</p> <p>“PKS tidak melihat al-hadist atau ayat-ayat al-qur’an sebagai pembatas ruang gerak perempuan. kita tidak beracuan kesana, PKS memandang islam flexibel, menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kalau sekarang saya merasakan hambatan berpolitik yang dulu sering digadang-gadang publik yang kemudian mnimbulkan labelisasi pada peran dna fungsi laki-laki atau perempuan, itu semakin teratasi, perempuan sebenarnya paling punya peran di kontribusi keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan berpolitik, sah-sah saja. Ketika perempuan sudah berkeluarga, dia akan lebih nyaman</p>
---	--

<p>daerah, keabsahan kepemimpinan wanita juga masih menjadi perdebatan para ulama. Ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i bahkan dengan jelas berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas</p> <p>Berikut beberapa poin pertanyaan dalam wawancara mendalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah calon legislative perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama selama bergabung dengan PKS Kota Surabaya ? 2. Apa saja manfaat yang bisa dirasakan calon legislative perempuan selama bergabung dengan PKS Kota Surabaya ? 3. Apakah calon legislatif perempuan memiliki dan mendapatkan pendidikan politik yang ideal ? 4. Bagaimana urgensi calon legislative perempuan bagi PKS Kota Surabaya ? 5. Bagaimana PKS Kota Surabaya meletakkan ideology islam dan politik praktis dalam memberikan manfaat bagi calon legislative perempuan ? 	<p>kalau sudah dapat support dari keluarga secara langsung. Sehingga tantangan sekeras apapun dia akan siap. Dan di sini PKS sebagai partai yang juga punya program keluarga harapan jadi akan sangat bermanfaat bagi perempuan-perempuan untuk bergabung menjadi caleg, karena kita <i>support</i> betul”</p> <p>INFORMAN Dwi Windyastuti, Dosen sekaligus Pengamat Politik Gender UNAIR</p> <p>“Partai islam tidak bisa lepas begitu saja dengan ideologi islamnya, apalagi yang eksklusif seperti PKS. Mereka menggunakan dasar islam dalam menjalankan politiknya, kan ada di dua titik yang dipakai, islamnya dan politik praktisnya. Kalau manfaat pasti ada tapi belum signifikan, banyak yang tidak mendapatkan pendidikan politik ideal selama menjadi calon legislatif ataupun selama mengikuti program-program partai. Bagi partai, perempuan sudah pasti penting, penting untuk memenuhi unsur regulasi pemilu. sama lah, saya kira, tapi perempuan di manapun itu akan tetap dibutuhkan meskipun tidak banyak perannya”</p> <p>Pinky Saptandaru, Dosen Antropologi Gender UNAIR dan Mantan Staff Ahli KemenPPPA</p> <p>“Manfaatnya ya banyak harusnya yang bisa diambil, tapi kan sejauh ini gak banyak yang direalisasikan. Caleg-caleg perempuan yang saya temui juga banyak yang kurang paham bagaimana berpolitik yang baik, pendidikannya kurang, asal masuk, asal jadi, ya..ini jadi tugas partai gimana cara menggodok calon yang diusung atau kader-kadernya itu bisar lebih kompeten. Kalau masalah dalil atau apapun itu seklai lagi saya tegaskan pasti masih dipakai, meskipun sudah mulai agak luntur, karena kebutuhan politik”.</p> <p>Nurul Amalia, Divisi Teknis KPU Kota</p>
--	--

		<p>Surabaya</p> <p>“Saya beberapa kali bertemu aktivis perempuan, mereka menyampaikan bahwa harusnya tidak ada hubungan dalil-dalil islam dengan urusan politik. Menyuarakan hak atau mewakili siapapun, gender tidak begitu berpengaruh. Hadist itu tidak berpengaruh, di islampun tidak di larang. Perempuan berkompetisi tidak ada larangan. Tapi mungkin kalau di partai islam seperti PKS masih ada karena menggunakan fatsu-fatsu politik ya kalau tidak salah, ya mungkin ada pertimbangan tersendiri, yang pasti kalau sekarang sudah banyak pihak yang tidak beracuan pada dalil-dalil yang memarginalkan perempuan. Kalau manfaat yang bisa mereka peroleh selama jadi caleg pastinya ada, dari kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti pasti sudah bisa dirasakan”</p>
--	--	--



LAMPIRAN II

HASIL OBSERVASI

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah secara langsung dengan berkunjung ke ruang PKS di DPRD Kota Surabaya, melakukan interaksi kepada subjek penelitian Achmad Suyanto, Ketua Fraksi PKS dan Reni Astuti, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Pengurus Partai, dan Caleg untuk Pemilu 2019. Observasi dilakukan selama proses pelengkapan data penelitian berupa wawancara dalam bentuk audio.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kondisi di ruang PKS selalu lengang, tidak banyak anggota DPRD dari fraksi ini yang datang terutama perempuan yang nyaris tidak muncul kecuali Reni Astuti yang juga pengurus partai, dengan dalih banyak anggota partai yang memiliki kegiatan di luar jam dinas, di samping juga bersamaan dengan banyaknya anggota yang ikut menjadi calon legislatif kembali di tahun 2019. Anggota dewan dari fraksi PKS selama observasi berlangsung, hanya datang ketika akan digelarnya Rapat internal ataupun Paripurna, itupun juga segelitir. Hasil lain dari pengamatan bahwa kepengurusan PKS pusat sangat didominasi posisi laki-laki, perempuan hanya satu dua yang menjabat, sedangkan di Kota Surabaya juga hampir sama, meskipun demikian PKS masih memberikan kesempatan perempuan yang menurut partai kompeten di bidangnya untuk ikut mengawal program PKS.

Pada partai ini, posisi pengambil kebijakan di PKS yaitu Ketua Partai juga sangat punya kedudukan penting dalam setiap program-program PKS terutama menyangkut pengorganisasian kepartaian hingga pengarusutamaan gender. Hal itu tertuang salah satunya dengan adanya AD/ART PKS yang selalu menjadi rujukan partai dalam mengambil keputusan. Dari hasil wawancara, PKS yang identik dengan partai kader faktanya tidak juga, banyak caleg-caleg yang diusung partai justru dari luar kepartaian karena berbekal basis sosial dan modal politiknya seperti apa, dengan sistem rekayasa sosial politik. Sementara ketika melakukan interaksi dengan Reni Astuti, ia adalah anggota DPRD yang bertahan selama 2 periode pemilihan, dan juga tetap ikut dalam pemilu untuk tahun 2019 ini. Baginya di PKS tidak ada kebijakan yang menyudutkan baik dari segi perempuan ataupun laki-laki, semua sama, ini juga mengacu pada dasar AD/ART PKS yang mana berorientasi pada kebutuhan publik dengan kepentingan politik praktis, dan kesan islam fundamentalis tidak terlalu ditonjolkan, sekalipun jika dari pengamat politik berbeda pandangan. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara pada bab analisis data dan pembahasan ataupun lampiran hasil wawancara penelitian.

LAMPIRAN III
AD/ART PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUKADIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998. Seluruh anak bangsa kembali mengulirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Bertolak dari kesadaran tersebut, maka dibentuklah Partai Keadilan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 bertepatan dengan duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (20-07-1998), yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai Keadilan melebur ke dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian, dengan ini Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama PARTAI KEADILAN SEJAHTERA disingkat PKS, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
- (2) Partai didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 09 Jumadil Ula 1423 bertepatan dengan duapuluh April tahun duaribu dua (20-04-2002).

Pasal 2

- (1) Partai berasaskan Islam.
- (2) Partai bercirikan bersih, peduli, dan profesional.

Pasal 3

- (1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Partai membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Partai memiliki atribut berupa nama, lambang, bendera, mars, dan himne.

**BAB II
VISI DAN MISI**

Pasal 5

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridloi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 7

Tujuan Partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 8

Partai berfungsi sebagai:

- a. wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara; serta
- c. memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota.
- (3) Keanggotaan Partai terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
- (4) Anggota Biasa terdiri atas:
 - a. Anggota Pendukung, yaitu
 - 1) Anggota Terdaftar, dan
 - 2) Anggota Aktif.
 - b. Anggota Terbina, yaitu
 - 1) Anggota Pemula, dan

- 2) Anggota Muda.
- c. Anggota Inti, yaitu
 - 1) Anggota Madya,
 - 2) Anggota Dewasa,
 - 3) Anggota Ahli, dan
 - 4) Anggota Purna.
- (5) Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap Partai dan mengajukan permohonan kepada Partai dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 10

Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:

- a. setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;
- b. setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina;
- c. setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti.

Pasal 11

- (1) Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila:
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri,
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain,
 - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai lainnya, atau
 - e. akan menduduki suatu jabatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dijabat oleh anggota partai politik.
- (2) Mekanisme pemberhentian Anggota diatur dengan ketentuan:
 - a. Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berhenti dengan sendirinya.
 - b. Anggota yang mengundurkan diri atau tidak aktif, keanggotaannya diberhentikan dengan surat keputusan Partai.
 - c. Anggota yang menjadi anggota partai politik lain keanggotaannya dicabut oleh Partai berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.
 - d. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.

BAB V LEMBAGA-LEMBAGA PARTAI

Pasal 12

Lembaga-lembaga Partai terdiri atas:

- a. Majelis Syura,
- b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dan
- c. Majelis Tahkim.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur organisasi Partai terdiri atas:

- (1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat, yaitu
 - a. Majelis Syura,
 - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - c. Majelis Pertimbangan Pusat,
 - d. Dewan Pengurus Pusat, dan
 - e. Dewan Syariat Pusat.
- (2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi, yaitu
 - a. Majelis Pertimbangan Wilayah,
 - b. Dewan Pengurus Wilayah, dan
 - c. Dewan Syariat Wilayah.
- (3) Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ialah Dewan Pengurus Daerah.
- (4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang.
- (5) Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa ialah Dewan Pengurus Ranting.
- (6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota.

BAB VII MAJELIS SYURA

Pasal 14

Majelis Syura ialah Lembaga Tertinggi Partai:

- (1) berfungsi sebagai lembaga *"Ahlul Halli wal-'Aqd"* (Majelis Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh seorang Ketua;
- (2) terdiri atas Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap;
- (3) mempunyai tugas:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. menetapkan:
 - 1) Falsafah Dasar Perjuangan Partai,
 - 2) Kebijakan Dasar Partai,
 - 3) Platform Kebijakan Pembangunan Partai, dan
 - 4) Rencana Strategis Partai;
 - c. menetapkan program kerja tahunan serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
 - d. mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan.
- (4) mempunyai wewenang:
 - a. atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
 - 1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
 - 2) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat, serta
 - 3) Ketua Dewan Syariat Pusat;

- b. memilih dan menetapkan Anggota Majelis Syura dari unsur pakar dan/atau tokoh;
 - c. mengubah serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - d. membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura;
 - e. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Syura;
 - f. menetapkan bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (5) musyawarah Majelis Syura diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (6) penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura, yaitu Ketua Majelis Syura;
 - (7) masa khidmah Majelis Syura, yaitu 5 (lima) tahun.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 15

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah Lembaga Tinggi Partai;

- (1) diketuai oleh Ketua Majelis Syura;
- (2) beranggotakan:
 - a. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
 - b. Presiden Partai,
 - c. Ketua Dewan Syariat Pusat,
 - d. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan
 - e. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
- (3) berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;
- (4) bertugas:
 - a. melaksanakan Putusan Majelis Syura,
 - b. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura,
 - c. membantu penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura,
 - d. mengoordinasikan Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pilihannya atau daerah yang ditentukan,
 - e. membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
 - f. menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura;
- (5) berwenang:
 - a. mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat,
 - b. merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura,
 - c. membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan

- oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya,
- d. merekomendasikan bakal calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf c,
 - e. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada suatu lembaga/organisasi,
 - f. menentukan sikap terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas terhadap kehidupan umat, bangsa, dan negara,
 - g. menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai dan/atau anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai lainnya dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku,
 - h. dapat membentuk tim kerja yang berkenaan dengan tugas strategis taktis sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e;
- (6) penanggung jawab penyelenggaraan kemahkamahannya.

BAB IX MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 16

Majelis Pertimbangan:

- (1) a. pada tingkat pusat ialah Majelis Pertimbangan Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariat Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
- b. pada tingkat provinsi ialah Majelis Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
- (2) pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan ialah sebagai berikut:
 - a. Majelis Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. Majelis Pertimbangan Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - c. Majelis Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
 - d. Majelis Pertimbangan Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
- (3) tugas Majelis Pertimbangan Pusat:
 - a. memberi usul dan pertimbangan atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat,
 - c. mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) wewenang Majelis Pertimbangan Pusat:
 - a. memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat, terhadap

perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Dan Fungsi Partai serta Putusan Majelis Syura,

- b. menetapkan dan menyosialisasikan Pedoman Partai,
- c. menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang diduga saling bertentangan atau tumpang tindih,
- d. membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariat Pusat,
- e. melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan struktur dan organisasi Partai di tingkat provinsi dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat.

BAB X DEWAN PENGURUS

Pasal 17

Dewan Pengurus:

- (1) a. pada tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariat Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
- b. pada tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
- c. pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pengurus Daerah dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
- d. pada tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun,
- e. pada tingkat desa/kelurahan ialah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 2 (dua) tahun;
- (2) pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Pusat:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - 2) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. Dewan Pengurus Wilayah:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
 - 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah,
 - c. Dewan Pengurus Daerah:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian, Dewan Pengurus Wilayah,
 - 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah,
 - d. Dewan Pengurus Cabang:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Daerah,

- 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang,
- e. Dewan Pengurus Ranting:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang,
 - 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting;
- (3) tugas Dewan Pengurus Pusat:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut struktur organisasi Partai di bawahnya,
 - b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
 - c. mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - d. menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi,
 - e. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Syariat Pusat,
 - f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) wewenang Dewan Pengurus Pusat:
 - a. melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat provinsi, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Wilayah dan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,
 - c. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri.

BAB XI DEWAN SYARIAT

Pasal 18

Dewan Syariat:

- (1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Syariat Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
- b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Syariat Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Syariat Pusat serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun.
- (2) pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Syariat adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Syariat Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,

- b. Dewan Syariat Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. Dewan Syariat Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, Dewan Syariat Pusat
 - d. Dewan Syariat Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
- (3) tugas Dewan Syariat Pusat:
- a. memberi usul dan pertimbangan atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syariat Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat;
 - c. menetapkan putusan atas masalah-masalah syariat yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariat Wilayah;
 - d. menyusun konsep-konsep kajian strategis nasional dari perspektif syariat;
 - e. melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syariat Wilayah;
 - f. melakukan kajian terhadap masalah-masalah syariat yang tidak terselesaikan di Dewan Syariat Wilayah;
 - g. menetapkan landasan syariat bagi Partai;
 - h. menerbitkan fatwa;
 - i. mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (4) wewenang Dewan Syariat Pusat:
- a. membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah;
 - b. mengajukan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai struktur organisasi Partai di tingkat provinsi;
 - c. menetapkan Panduan Dewan Syariat Pusat;
 - d. mensosialisasikan Panduan Dewan Syariat Pusat dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya;
 - e. merepresentasikan pandangan dan sikap syariat Partai;
 - f. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan-pandangan syariat;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesyariaan.

BAB XII

DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 19

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kerja yang bersifat kolektif dan kolegal, Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi.

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum musyawarah unsur pimpinan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - b. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah.

- (3) Setiap penyelenggaraan musyawarah yang berkenaan dengan hal-hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah.

BAB XIII MUSYAWARAH

Pasal 20

- (1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus struktur organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup wewenang masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan.
- (2) Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.
- (3) Keputusan hasil musyawarah hanya dapat dibatalkan oleh penyelenggara musyawarah itu sendiri atau oleh struktur organisasi Partai yang sekurang-kurangnya satu tingkat di atasnya.
- (4) Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan, yaitu
 - a. Musyawarah Majelis Syura,
 - b. Musyawarah Nasional,
 - c. Musyawarah Wilayah,
 - d. Musyawarah Daerah,
 - e. Musyawarah Cabang,
 - f. Musyawarah Ranting, dan
 - g. Rapat-rapat Partai.
- (5) Hal-hal yang berkenaan dengan musyawarah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XIV PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI

Pasal 21

Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota Partai.

Pasal 22

- (1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagai berikut:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 2. Putusan Majelis Syura,
 3. Putusan Musyawarah Nasional,
 4. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 5. Pedoman Partai,
 6. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syariat Pusat.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan Peraturan Partai dan Tata Urut Peraturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

**BAB XV
RANGKAP JABATAN**

Pasal 23

Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan kepada Anggota dalam seluruh kepengurusan struktur organisasi Partai, kecuali keanggotaan dalam Majelis Syura serta Ketua Unit Pembinaan dan Pengaderan.

**BAB XVI
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**

Pasal 24

- (1) Keuangan Partai berasal dari:
 - a. Iuran Anggota,
 - b. Hibah,
 - c. Sumbangan dari Anggota dan masyarakat,
 - d. Sumber lain yang halal dan sah serta tidak mengikat.
- (2) Partai menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**BAB XVII
HUBUNGAN KEORGANISASIAN**

Pasal 25

- (1) Partai melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
- (2) Ketua Majelis Syura dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur maupun Anggota Partai.
- (3) Hubungan Majelis Pertimbangan Pusat dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya, dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat.
- (4) Hubungan Dewan Pengurus Pusat dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah bersifat langsung.
- (5) Hubungan Dewan Syariat Pusat dengan Dewan Syariat Wilayah bersifat langsung.

**BAB XVIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Pasal 26

- (1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pengurus, atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.

- (2) Partai dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, dakwah Islam, dan/atau Partai.
- (3) Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang Keanggotaan, dan pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan Anggota yang melanggar aturan syariat dan/atau organisasi, menodai citra Partai, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan Partai lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penjatuhan sanksi diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XIX

PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 27

Penggantian kepemimpinan dalam kondisi khusus ialah penggantian pejabat dalam suatu masa khidmah oleh struktur organisasi Partai yang berwenang.

- (1) Dalam hal pejabat pada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Majelis Syura dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif atau menunjuk pejabat sementara.
- (2) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan harian Partai di tingkat pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif, menunjuk pejabat sementara, atau menugaskan pejabat yang melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan tidak dapat meneruskan amanahnya, Partai dapat menunjuk pejabat sementara atau pejabat yang melaksanakan tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dalam Pedoman Partai

BAB XX

REKRUTMEN JABATAN POLITIK

Pasal 28

- (1) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota dilakukan melalui suatu proses penjurangan dan penyaringan dengan memperhatikan:
 - a. mekanisme yang demokratis dan terbuka,
 - b. kapabilitas dan profesionalitas.
- (2) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui suatu proses penjurangan dan penyaringan dengan memperhatikan:
 - a. jenjang keanggotaan,
 - b. kapabilitas dan profesionalitas,

- c. keterwakilan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XXI

KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 29

- (1) Partai dapat membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan penempatan Anggota dalam alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fraksi adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan pembentukan kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap Fraksi diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Dewan Pengurus Pusat dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, pembubaran kepengurusan Fraksi, penempatan, dan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXII
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI
PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 30

- (1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota pada lembaga perwakilan sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan maksud ayat (1) dan (2), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
DEWAN PAKAR

Pasal 31

- (1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang dibentuk Partai di tingkat pusat dan provinsi.
- (2) Dewan Pakar di tingkat pusat:
 - a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat, serta
 - b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Pusat.
- (3) Dewan Pakar di tingkat provinsi:
 - a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, serta
 - b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pakar diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XXIV
MAJELIS TAHKIM

Pasal 32

Majelis Tahkim adalah penyelenggara tugas kemahkamahannya Partai berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, melakukan uji materi, dan

memberikan penafsiran atas Peraturan Partai, dan memutus perselisihan kewenangan.

Pasal 33

Kewenangan Majelis Tahkim berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, meliputi pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan kepengurusan Partai adalah sebagai berikut:

- a. untuk Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah berdasarkan keputusan Majelis Syura.
- b. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat pusat adalah berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- c. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi adalah berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- d. ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) huruf c serta yang berkenaan untuk organisasi dan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 34

- (1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. diproses oleh suatu badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi Dewan Pengurus Pusat
 - b. badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi tersebut menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Tahkim.
- (2) Keputusan Majelis Tahkim dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 35

- (1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal melakukan uji materiel atas Peraturan Partai terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memberikan keputusan atas perbedaan penafsiran mengenai Peraturan Partai, menyelesaikan perselisihan kewenangan antarstruktur organisasi Partai, dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pusat.
- (2) Keputusan Majelis Tahkim berkenaan dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB XXV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau Anggota Majelis Syura.
- (2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 17 (tujuh belas) orang Anggota Majelis Syura.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus

-
- ditandatangani oleh seluruh pengurus pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
- (4) Usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
 - (5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Majelis Syura.
 - (6) Putusan diambil dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal pembentukan struktur dan/atau kepengurusan Partai pada suatu kabupaten/kota atau kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dapat dilakukan, maka Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk Perwakilan Partai yang ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan arahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura VII pada hari Jumat, tanggal 22 Shafar 1434 bertepatan dengan 4 Januari 2013 (Empat Januari Dua ribu Tigabelas) di Lembang Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

**MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KETUA,**

K.H. HILMI AMINUDDIN

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB I ATRIBUT PARTAI

Pasal 1

(1) Lambang Partai sebagai berikut:



(2) Tafsir lambang:

- a. kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
- b. bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
- c. untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- d. putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.
- e. hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
- f. kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.
- g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

(3) Ketentuan tentang atribut Partai, yaitu nama, lambang, bendera, mars, dan himne lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran-sasaran pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan Partai, Kebijakan Dasar Partai, dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai, serta Rencana Strategis Partai.

Pasal 3

Sasaran atau target Partai, antara lain:

- a. terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan iman dan materi dalam upaya membentuk karakter bangsa dan peradaban manusia;

- b. terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala individu, keluarga, komunitas kerja, maupun profesi;
- c. tersedianya Anggota sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa;
- d. terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia;
- e. terumuskannya alternatif solusi atas problematika bangsa dan negara;
- f. terjaminnya kelestarian khazanah sumber daya bangsa dan negara;
- g. tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan;
- h. terjaminnya penegakan hak asasi manusia;
- i. terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan solidaritas sosial;
- j. terbentuknya generasi penerus yang lebih baik.

Pasal 4

Untuk mencapai sasaran, Partai melakukan kegiatan, antara lain:

- a. mengokohkan struktur organisasi dan soliditas kepemimpinan Partai;
- b. menyelenggarakan pengaderan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas politik Anggota;
- c. berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional;
- d. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;
- e. membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif;
- f. menyelenggarakan kajian sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan baik secara akademis maupun implementatif;
- g. memprioritaskan amal saleh, kerja nyata, dan kemitraan;
- h. menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional;
- i. membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi;
- j. meningkatkan kesadaran akan gizi, kesehatan, dan sumber daya keluarga;
- k. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesadaran beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;
- m. merumuskan dan mensosialisasikan konsepsi, antara lain berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, olah raga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuan, keagamaan (moral, mental, dan spiritual), kewanitaan, kepemudaan, kepanduan, keluarga, penanggulangan bencana, serta bela negara.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai.
- (2) Anggota Pendukung dan Anggota Terbina diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah.

- (3) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Anggota Ahli dan Anggota Purna diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi.
- (6) Khusus untuk pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi dan mendapatkan putusan dari Majelis Tahlkim.
- (7) Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota wajib mengikrarkan janji sebagai berikut:
"Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Partai Keadilan Sejahtera, serta setia kepada pimpinan Partai".
- (2) Setiap Anggota wajib mengikuti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan Kepartaian, sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
- (3) Setiap Anggota wajib taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Partai.
- (4) Setiap Anggota wajib melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (5) Setiap Anggota harus terlibat aktif dalam kegiatan kepartaian.
- (6) Setiap Anggota wajib menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.

Pasal 7

Hak Anggota:

- a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
- b. memperoleh pembinaan;
- c. mempunyai hak bicara;
- d. mempunyai hak suara;
- e. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, calon anggota lembaga perwakilan, atau calon pejabat publik;
- f. mengemukakan pendapat serta usulan secara bebas dan terbuka, menyampaikan nasihat dan kritik, berkreasi, serta berinisiatif dalam berbagai bentuk, secara beradab dan sesuai tertib organisasi;
- g. membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
- h. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian.

Pasal 8

Hal-hal lain yang berkenaan dengan Keanggotaan Partai, diatur lebih lanjut dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV MAJELIS SYURA

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura;
 - b. Anggota Tidak Tetap, yaitu:
 - 1) Anggota yang terpilih oleh Anggota Inti melalui proses penjurangan, penyaringan, dan penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya; dan
 - 2) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam suatu musyawarah Majelis Syura.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut:
 - a. Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun;
 - b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung jawab;
 - c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Putusan Majelis Syura, Putusan Musyawarah Nasional, serta peraturan dan kebijakan Partai;
 - d. mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura;
 - e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih;
 - f. berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;
 - g. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan; serta
 - h. berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur organisasi Partai di tingkat provinsi.
- (3) Jumlah Anggota Majelis Syura paling sedikit 66 (enam puluh enam) orang dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- (4) Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan ikrar pada saat pelantikan dalam Musyawarah Majelis Syura.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua Majelis Syura diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sub 1).
- (2) Ketua Majelis Syura terpilih mengucapkan ikrar dalam Musyawarah Majelis Syura.
- (3) Anggota Majelis Syura mengucapkan ikrar kepada Ketua Majelis Syura terpilih.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sub 2) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud ayat (1) mengucapkan ikrar sebagai Anggota Majelis Syura dan kepada Ketua Majelis Syura.

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Majelis Syura;

- b. masa keanggotaannya sebagai Anggota Ahli sekurang-kurangnya 12 (duabelas) tahun;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;
 - d. memiliki kemampuan kesehatan untuk mengemban beban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.
- (2) Pengangkatan Ketua Majelis Syura ditetapkan melalui suatu surat keputusan pimpinan sidang musyawarah Majelis Syura.
- (3) Tugas Ketua Majelis Syura:
- a. memimpin Majelis Syura;
 - b. memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Majelis Syura yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada Anggota Majelis Syura yang bersangkutan;
 - d. menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis Syura.

Pasal 13

- (1) Gugurnya keanggotaan Majelis Syura, karena:
- a. meninggal dunia,
 - b. berhalangan tetap,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.
- (2) Anggota Majelis Syura diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. tidak lagi memenuhi ketentuan selaku Ketua, sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
 - c. sebab lain yang diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syura.
- (3) Pemberhentian seorang Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur berikut:
- a. yang bersangkutan telah diberi nasihat oleh Ketua Majelis Syura atau pihak yang ditunjuk oleh Musyawarah Majelis Syura; atau
 - b. mendapat rekomendasi pemberhentian dari Majelis Tahkim.
- (4) Dalam hal gugurnya keanggotaan seorang Anggota Majelis Syura, selain Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Majelis Syura:
- a. memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari jabatannya yang berkaitan langsung dengan status keanggotaannya di Majelis Syura;
 - b. menetapkan penggantinya, dengan ketentuan:
 - 1) apabila yang bersangkutan adalah Anggota hasil pemilihan raya maka penggantinya ialah calon anggota dengan nomor urut perolehan suara terbanyak di bawahnya dari daerah pemilihan yang sama;
 - 2) apabila yang bersangkutan adalah dari unsur Anggota terpilih oleh Musyawarah Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.
- (5) Anggota Majelis Syura pengganti dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura sebelumnya.
- (2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar usulan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga Anggota Majelis Syura yang diajukan melalui Ketua Majelis Syura.
- (3) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengusulkan perubahan jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

Pasal 15

- (1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (2) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah dapat diselenggarakan setelah ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah diselenggarakan dengan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (4) Undangan kepada Anggota Majelis Syura disertai jadwal dan agenda harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk Musyawarah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, Musyawarah diundur paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan berapa pun jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 16

- (1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.
- (2) Pengambilan Putusan Majelis Syura dilaksanakan secara ijmak (aklamasi).
- (3) Jika ijmak tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (4) Jika hasil pemungutan suara diperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
- (5) Jika pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Putusan adalah jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura memberikan hak suaranya.
- (6) Dalam hal Majelis Syura telah berakhir masa khidmahnya, sedangkan Majelis Syura yang baru belum terbentuk, maka Majelis Syura tetap berhak mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua Majelis Syura, mengubah Anggaran Dasar, mengubah Anggaran Rumah Tangga, mengangkat Anggota Tidak Tetap baru atau pengganti, serta memberhentikan Anggota.

Pasal 17

Hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Syura diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB V

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 18

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat:

- a. dalam penyelenggaraan rapat, dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan;
- b. hasil rapat disosialisasikan melalui struktur Partai sesuai dengan tingkat kepentingannya;
- c. tidak dapat mencampuri, intervensi, atau membatalkan Keputusan Dewan Syariat Pusat tentang Fatwa;
- d. rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- e. untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 19

Hal-hal yang berkenaan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Pasal 20

Majelis Pertimbangan Pusat:

- (1) kepengurusan terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Komisi-komisi;
- (2) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat pusat;
- (3) menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yakni Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat baik sebagai inisiatif maupun atas usulan;
- (5) untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 21

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura;
 - b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (2) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
- d. bersifat amanah dan berwibawa;
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

BAB VII DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 22

- (1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.
- (2) Presiden Partai berhak bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Presiden,
 - b. Sekretaris Jenderal,
 - c. Bendahara Umum,
 - d. Bidang,
 - e. Badan, dan
 - f. Departemen.

Pasal 23

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Jenderal, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk jabatan Ketua Departemen sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat;

- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 24

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Putusan Majelis Syura;
- b. menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariat Pusat;
- e. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- f. melakukan seleksi atas calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- g. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- h. menetapkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- i. menetapkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- j. menarik dan mengelola Iuran Anggota;
- k. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- l. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 25

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- b. menetapkan produk-produk konsepsional untuk tugas-tugas internal dan struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Partai.

Pasal 26

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. membentuk dan mengoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- e. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif;
- f. merancang menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota.

Pasal 27

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota;
- c. atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

Pasal 28

Ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII DEWAN SYARIAT PUSAT

Pasal 29

Kepengurusan Dewan Syariat Pusat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Komisi-komisi.

Pasal 30

(1) Persyaratan khusus:

- a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

(2) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syariat;
- d. bersifat amanah dan berwibawa;
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dewan Syariat Pusat;
- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Pusat.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI

Majelis Pertimbangan Wilayah

Pasal 31

- (1) Majelis Pertimbangan Wilayah adalah penyelenggara supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Komisi-komisi.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
 - d. bersifat amanah dan berwibawa;
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (5) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (6) Majelis Pertimbangan Wilayah, atas perintah atau dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.

Pasal 32

Majelis Pertimbangan Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, struktur organisasi Partai di tingkat pusat, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Musyawarah Kerja Wilayah;

-
- c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
 - d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Majelis Pertimbangan Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 34

- (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Umum,
 - b. Wakil Ketua Umum,
 - c. Sekretaris Umum, dan
 - d. Bendahara Umum.

Pasal 35

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta Ketua dan Sekretaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - c. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;

- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 36

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
- b. melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- d. atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya;
- e. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- f. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- g. melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
- h. merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengurus Pusat;
- i. mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- j. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- k. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- l. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- m. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan Pengurus Pusat;
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 37

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat;

- b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah;
- c. menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Pasal 38

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengarah dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah;
- b. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- c. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- d. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
- e. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 39

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Dewan Syariah Wilayah

Pasal 41

- (1) Dewan Syariah Wilayah adalah penyelenggara supervisi keSyariaatan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Syariah Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Komisi-komisi.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - b. untuk jabatan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.

(4) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syariat;
- d. bersifat amanah dan berwibawa;
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariat Wilayah;
- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Wilayah.

(5) Ketua Dewan Syariat Wilayah membentuk struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Syariat Pusat dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 42

Dewan Syariat Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariat Pusat, hasil Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. menyelenggarakan supervisi, pendidikan, dan pelatihan kesyariaan Anggota;
- c. menetapkan putusan dalam kaitan dengan pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pengurus dan Anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan arahan dari Dewan Syariat Pusat;
- d. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syariat Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syariat Pusat;
- e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariat Pusat;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Syariat Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Syariat Pusat.

BAB X

DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 44

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah Wilayah, Hasil

Musyawarah Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah.

- (2) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, yaitu:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - b. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; serta
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah.
- (3) Unsur Dewan Pengurus Pusat dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (4) Kesepakatan atau rekomendasi ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah sesuai dengan kewenangan.
- (5) Kesepakatan atau rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat provinsi ke bawah.
- (6) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syariat Wilayah.
- (7) Merekomendasikan nama Anggota Dewan Pakar di tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (8) Merekomendasikan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan usul Dewan Pengurus Daerah terkait, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (9) Mengajukan nama pasangan bakal calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
- (10) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (11) Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah menyampaikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Dewan Pengurus Pusat.

BAB XI **STRUKTUR ORGANISASI PARTAI** **PADA LINGKUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Dewan Pengurus Daerah

Pasal 45

- (1) Dewan Pengurus Daerah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat kabupaten/kota mencakup struktur organisasi Partai di bawahnya.
- (2) Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Bendahara.

Pasal 46

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - b. untuk jabatan Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Badan sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
 - d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
 - e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Ketua Dewan Pengurus Daerah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 47

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- e. menerima dan mengelola hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- f. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- g. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- h. melaksanakan Musyawarah Daerah atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 48

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Cabang;

- b. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- c. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan eksekutif;
- d. atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan struktur organisasi di bawahnya sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
- e. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 49

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Dewan Pengurus Cabang

Pasal 51

- (1) Dewan Pengurus Cabang adalah struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan.
- (2) Dewan Pengurus Cabang berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Bendahara.

Pasal 52

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
 - b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

- c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
 - e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 53

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
- b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- c. mengajukan rancangan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;
- d. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;
- e. menarik iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- f. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- h. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Ranting;
- j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- k. melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan Pengurus Daerah; dan
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

Dewan Pengurus Ranting

Pasal 54

- (1) Dewan Pengurus Ranting adalah struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Bendahara.

Pasal 55

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Madya;
 - b. untuk jabatan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Muda dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Muda.

(2) Persyaratan umum:

- a. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
- b. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
- c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
- d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Ranting.

(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 56

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
- b. menyusun rencana program dan anggaran Dewan Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang;
- c. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- d. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
- e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
- f. melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah Dewan Pengurus Cabang; dan
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

**BAB XII
PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI**

Pasal 57

- (1) Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk perwakilan Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu negara atas permintaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara tersebut.
- (2) Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB XIII
MUSYAWARAH PARTAI**

Pasal 58

- (1) Musyawarah Partai sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Majelis Syura merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai;
 - b. Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas, dengan ketentuan:
 - 1) Dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - 2) Peserta terdiri atas:
 - a) Anggota Majelis Syura;
 - b) unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat;
 - c) unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah;
 - d) unsur Dewan Pengurus Daerah.
 - 3) ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional antara lain Falsafah Dasar Perjuangan, Platform Kebijakan Pembangunan, Rencana Strategis, dan Arah Kebijakan Partai;
 - 4) ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang diputuskan oleh Majelis Syura;
 - c. Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - d. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
 - e. Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 3 (tiga) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Daerah;
 - f. Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Selain jenis-jenis musyawarah di atas, Partai dapat menyelenggarakan rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat-rapat resmi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f serta ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIV **HUBUNGAN KEORGANISASIAN**

Pasal 59

- (1) Partai menyelenggarakan hubungan keorganisasian, baik secara formal maupun non-formal.
- (2) Partai dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hubungan keorganisasian atas kewenangan Dewan Pengurus Pusat dan struktur Partai di bawahnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 60

- (1) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Syariat Pusat.

Pasal 61

Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah belum terbentuk, maka segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terbentuknya daerah otonomi baru, Dewan Pengurus Pusat membentuk tim penyiapan pembentukan struktur organisasi kepengurusan Partai untuk daerah tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 64

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura VII pada hari Jumat, tanggal 22 Shafar 1434 bertepatan dengan 4 Januari 2013 (Empat Januari Dua ribu Tigabelas) di Lembang Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

**MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KETUA,**

K.H. HILMI AMINUDDIN

**LAMPIRAN IV
FOTO PENELITIAN**



**Bersama Achmad Suyanto
Ketua Umum PKS
Kota Surabaya**



**Bersama Reny Astuti
Anggota DPRD Kota Surabaya dan
Pengurus partai PKS**



**Bersama Nurul Amalia
Divisi Teknis KPU
Kota Surabaya**



**Bersama Dwi Windyastuti
Dosen dan Pengamat Politik Gender
UNAIR Surabaya**



**Pinky Saptandaru
Antropolog Gender sekaligus Mantan
Staff Ahli KemenPPPA**

LAMPIRANV
DATA CALEG PARTAI POLITIK

PEMILIHAN LEGISLATIF 2004-2009

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KETERWAKILAN	
		L	P
1	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	16	8
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	13	6
3	PARTAI BULAN BINTANG	25	18
4	PARTAI MERDEKA	9	4
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	32	18
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	21	10
7	PARTAI PEREMPUAN INDONESIA BARU	15	7
8	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	38	10
9	PARTAI DEMOKRAT	31	11
10	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	30	14
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	21	6
12	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	7	3
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	42	10
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	22	14
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	42	12
16	PARTAI Keadilan Sejahtera	33	14
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	21	7
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	44	9
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25	15
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	31	8
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	14	12
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA	11	5
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	9	1
24	PARTAI PELOPOR	25	11

PEMILHAN LEGISLATIF 2009-2014

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KETERWAKILAN	
		L	P
1	PARTAI HATI NURANI	41	19
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	10	3

3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	9	4
4	PARTAI PEDULI RAKYAT INDONESIA	32	15
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	25	9
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	2	2
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	6	8
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	37	18
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	49	11
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	0
11	PARTAI KEDAULATAN	0	27
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	20	7
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	39	14
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	17	9
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	8	4
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	29	10
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	11	3
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	21	9
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	4	6
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	15	7
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	23	8
22	PARTAI PELOPOR	5	4
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	39	20
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	37	15
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	24	13
26	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	17	11
27	PARTAI BULAN BINTANG	21	11
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	36	11
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	16	9
30	PARTAI PATRIOT	41	16
31	PARTAI DEMOKRAT	41	18
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	10	8
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	15	7
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	26	9
35	PARTAI MERDEKA	9	7
36	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	8	7
37	PARTAI SARIKAT INDONESIA	8	5
38	PARTAI BURUH	20	5

PEMILIHAN LEGISLATIF 2014-2019

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KETERWAKILAN	
		L	P
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	32	18
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	33	17
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	33	17
4	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA	33	17
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	33	17
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	33	17
7	PARTAI DEMOKRAT	33	17
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	33	17
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	33	17
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	31	16
11	PARTAI BULAN BINTANG	20	13
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	32	18

